

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN  
DAN INFLASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN  
DI INDONESIA TAHUN 1992–2022**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:  
**JULIOFANO ADE PERMANA SUKA**  
12020119140126

**FEB UNDIP**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERISTAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN  
INFLASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA  
TAHUN 1992–2022**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Juliofano Ade Permana Suka

NIM : 12020119140126

Telah Disetujui sebagai penelitan dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk

*Direview*

Pembimbing,



**Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E.**

NIP. 199612282024061001

**FEB UNDIP**

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Juliofano Ade Permana Suka

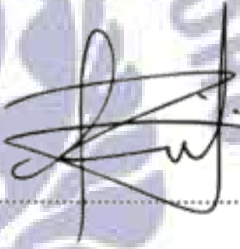


Nomor Induk Mahasiswa : 12020119140126

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
KEMISKINAN DAN  
INFLASITERHADAPKETIMPANGAN  
PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1992-  
2022**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Juni 2026

Tim Penguji

1. Mohamad Egi Destiariono, S.E., (.....)  
M.S.E. 
2. Mayanggita Kirana, S.E., M.Sc. (.....)  

3. Fathimah Kurniawati, S.E., M.Ec.Dev. (.....)  


**FEB UNDIP**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1992–2022. Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan pembangunan yang tercermin melalui Indeks Gini dan dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan yang belum merata. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pascakrisis 1998, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan akibat disparitas antarwilayah dan kelompok pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan serta relevansi Hipotesis Kuznets dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,040. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Sementara itu, variabel kuadrat pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan negatif namun tidak signifikan secara statistik ( $p = 0,219$ ), sehingga belum dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai keberlakuan Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets di Indonesia. Selain itu, tingkat kemiskinan ( $p = 0,837$ ) dan inflasi ( $p = 0,937$ ) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,2947, yang berarti bahwa 29,47% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif dibandingkan oleh perubahan tingkat kemiskinan maupun inflasi selama periode penelitian.

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Hipotesis Kuznets.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of economic growth, poverty, and inflation on income inequality in Indonesia for the period 1992–2022. Income inequality is a development problem that is reflected through the Gini Index and is influenced by the uneven distribution of development results. Although Indonesia experienced relatively stable economic growth after the 1998 crisis, income inequality is still a challenge due to disparities between regions and income groups. This study uses a quantitative approach with time series data to examine the influence of economic growth, poverty, and inflation on income inequality and the relevance of the Kuznets Hypothesis in the Indonesian context. The results of the research are expected to make an empirical contribution to the development of development economics studies and become a consideration in the formulation of inclusive development policies.*

*The results show that economic growth has a positive and significant effect on income inequality in Indonesia during the period 1992–2022, which is shown by a probability value of 0.040. These findings indicate that an increase in economic growth tends to be followed by an increase in income inequality, so the benefits of economic growth have not been fully evenly distributed. Meanwhile, the quadratic variable of economic growth shows a negative but not statistically significant relationship direction ( $p = 0.219$ ), so it cannot provide strong empirical evidence regarding the applicability of the Kuznets Inverted U-Curve Hypothesis in Indonesia. In addition, poverty rates ( $p = 0.837$ ) and inflation ( $p = 0.937$ ) were not shown to have a significant effect on income inequality. The results of the estimation showed a determination coefficient value ( $R^2$ ) of 0.2947, which means that 29.47% of the variation in income inequality could be explained by variables in the model, while the rest was influenced by other factors outside the study. Overall, these findings indicate that income inequality in Indonesia is more influenced by economic growth that is not yet fully inclusive than by changes in poverty rates and inflation during the study period.*

**Keywords:** *Economic Growth, Income Inequality, Kuznets Hypothesis.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACK</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	23
2.1 Landasan Teori .....	23
2.1.1 Ketimpangan Ekonomi.....	23
2.2 Hubungan antar Variabel .....	39
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	39
2.2.2 Hubungan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	40
2.2.3 Hubungan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	41
2.2 Penelitian Terdahulu .....	43
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	45
2.4 Hipotesis Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	50
3.3 Metode Pengumpulan data .....	52
3.4 Metode analisis.....	53
3.5 Estimasi Model Regresi .....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
4.1 Statistik Deskriptif Variabel.....	58
4.2 Uji Asumsi Klasik .....	71
4.3 Estimasi Model Regresi .....	78
4.4 Uji Statistik dan Pengujian Hipotesis.....	79
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran dan Masukan .....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan paling fundamental sekaligus paradoksal dalam diskursus ekonomi pembangunan global. Secara konseptual, ketimpangan mencerminkan adanya asimetri dalam penguasaan sumber daya dan pembagian hasil pembangunan antar berbagai lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Meskipun banyak negara berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi pendapatan nasional, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan sehingga ketimpangan tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) menegaskan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui terbatasnya investasi pada modal manusia, menurunnya kesempatan ekonomi, serta melemahnya mobilitas sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan Joseph E. Stiglitz (2012) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya memengaruhi distribusi kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menurunkan efisiensi ekonomi,

membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, serta memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, Indonesia tidak luput dari tantangan struktural kesenjangan ini. Meskipun secara historis Indonesia berhasil keluar dari berbagai guncangan krisis dan mencatatkan ekspansi output ekonomi yang stabil, persoalan pemerataan kekayaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. The World Bank (2016) secara spesifik menyoroti fenomena ini melalui peringatan akan adanya "*Rising Divide*" atau jurang pemisah yang kian melebar di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok pendapatan teratas, sementara perbaikan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah berjalan dengan akselerasi yang jauh lebih lambat. Tingginya derajat ketimpangan ini pada akhirnya bertindak sebagai penahan laju pembangunan inklusif, di mana ia secara langsung mereduksi efektivitas pengentasan kemiskinan dan memperbesar kerentanan masyarakat terhadap guncangan stabilitas harga atau inflasi.

Keberhasilan Indonesia dalam bangkit dari krisis moneter 1997 menjadi fondasi penting bagi fase pertumbuhan ekonomi selanjutnya. The World Bank (2015) mencatat bahwa selama periode 2001 hingga 2012, Indonesia berhasil mengandakan ukurannya melalui proses stabilisasi makroekonomi yang bertahap. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi pasca-pemulihan, yang kemudian berhasil mengembalikan kepercayaan investor

global. Namun, di balik angka pertumbuhan yang impresif dan stabilitas harga yang terjaga tersebut, muncul tantangan baru mengenai kualitas pembangunan. Akselerasi PDB yang terjadi ternyata belum sepenuhnya mampu menjamin distribusi pendapatan yang merata, sehingga menciptakan dinamika hubungan yang kompleks antara pertumbuhan ekonomi dan derajat ketimpangan nasional.

Pada periode 2000–2011, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yang didukung oleh boom komoditas global. Kemudian pada periode 2011–2015 mengalami perlambatan seiring dengan penurunan harga komoditas dunia (The World Bank, 2015). Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi (Sparrow, Dartanto, & Hartwig, 2020). Namun demikian, ekonomi Indonesia pada periode 2021–2023 kembali menunjukkan pemulihan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5%. Meskipun tren pertumbuhan tersebut tergolong stabil, berbagai studi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa perlambatan struktural serta risiko stagnasi ekonomi apabila tidak diiringi dengan transformasi ekonomi yang lebih mendalam dan berkelanjutan (The World Bank, 2023).

Selanjutnya, dalam kajian pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam periode tertentu.

Hal ini menjadi alat ukur yang paling lazim digunakan untuk melihat kinerja ekonomi suatu negara. Peningkatan PDB sering kali diinterpretasikan sebagai adanya kemajuan dalam aktivitas ekonomi dan keberhasilan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah (Todaro & Smith, 2015).

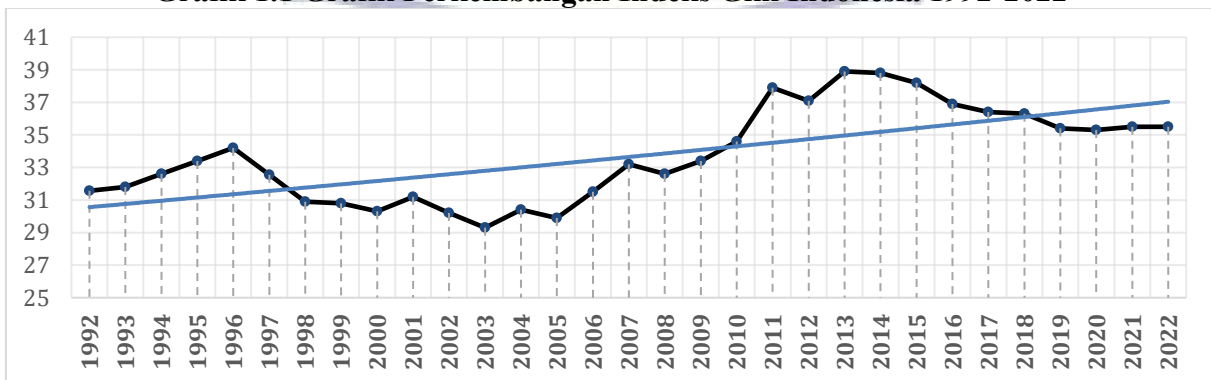
Lebih dalamnya, pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan per kapita, serta mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Perspektif ini menandai pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Banyak negara berkembang (dalam hal ini termasuk Indonesia) menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Namun demikian, paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented*) tidak terlepas dari berbagai kritik, terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap aspek pemerataan hasil pembangunan. Praktikanya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan ekonomi. Selain itu, di dalam konteks pembangunan, kondisi ketimpangan menjadi indikator penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Stiglitz, 2012).

Pengukuran ketimpangan pendapatan secara umum dilakukan melalui indikator Gini Ratio atau Koefisien Gini. Indikator ini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu wilayah menyimpang dari kondisi distribusi yang sempurna (merata). Hal ini sejalan apa yang didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik, 2022) sebagai berikut, Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk, dengan nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Penerapan indikator ini menjadi penting dalam analisis ekonomi makro karena mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi distribusi kesejahteraan dalam masyarakat.

Kondisi ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia sejak tahun 1992-2022 tentu saja sejalan dengan pembangunan ekonomi yang ada dengan kondisi yang fluktuatif (Yusuf & Sumner, 2015). Pasca krisis keuangan yang terjadi di Asia terutama pada 1998, ketimpangan yang terjadi di Indonesia mengalami kondisi yang cukup tinggi meski upaya-upaya pemulihan oleh pemerintah sedang berjalan (The World Bank, 2016). Data tersebut kemudian dapat disajikan melalui grafik sebagai berikut;

**Grafik 1.1 Grafik Perkembangan Indeks Gini Indonesia 1992-2022**



Sumber : The World Bank (2026)

Berdasarkan grafik World Bank dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Indonesia pada 1998 pasca krisis berada di poin 30,9 kemudian mengalami kenaikan pada poin 31,2 pada tahun 2001 sebelum kemudian jatuh kembali pada 29,3 (kondisi ini mengalami penurunan jauh lebih parah dibandingkan krisis 1997). Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Indeks Gini Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil (naik dan turun secara berulang). Baru kemudian pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi ini cenderung mengalami kenaikan hingga pada puncaknya pada tahun 2013 dengan poin 38,90. Angka tersebut angka yang paling tinggi selama 25 tahun terakhir.

Kondisi ini kemudian dapat ditekan dengan stabil pada masa Joko Widodo yang cenderung mengalami penurunan dari poin 38,20 pada tahun 2014 menuju poin 35,50 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah dalam menekan ketimpangan, distribusi pendapatan yang merata masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini sejalan dengan *“high and persistent inequality can hamper economic growth and undermine social cohesion”* (OECD, 2015).

Kondisi ketimpangan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia setidaknya dicerminkan pada disparitas antar wilayah, desa–kota, serta kelompok pendapatan. Kondisi perkotaan di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, dan lainnya) cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan namun memiliki tingkat ketimpangan yang lebih besar. Kemudian, kondisi ketimpangan antar wilayah (seperti antar Pulau Jawa dan luar Jawa) masih

memiliki sudut pandang yang mencolok. Kondisi ini diperparah dengan timpangnya akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kutipan laporan Bank Dunia menggaris bawahi bahwa sepuluh persen (10%) rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai kekayaan dan konsumsi negara secara tidak proporsional dibandingkan dengan kelompok terbawah. Hal ini dapat maknai bahwa potensi ketimpangan sosial dapat melebar karena adanya penguasaan kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu saja (The World Bank, 2016).

Kondisi tersebut mendorong implikasi ketimpangan baik dari segi ekonomi, tatanan sosial, dan kesempatan politik di Indonesia. Secara ekonomi, ketimpangan dapat menurunkan efektivitas pertumbuhan karena daya beli masyarakat tidak merata yang kemudian berdampak pada tatanan sosial yang mampu memicu konflik sosial, meningkatkan tingkat kriminalitas, serta memperlemah kohesi sosial dalam masyarakat. Setidaknya diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, dimana tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan (Yusuf & Sumner, 2015).

Lebih dalamnya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak dapat dilepaskan melalui pemikiran Simon Kuznets yang menjelaskan pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan cenderung disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan akan mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu dan semakin matangnya struktur ekonomi (Kuznets, 1955).

Pemikiran ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika distribusi pendapatan dalam proses pembangunan ekonomi.

Konsep utama yang diperkenalkan oleh Kuznets adalah hipotesis kurva U terbalik (*inverted-U hypothesis*). Hipotesis ini menggambarkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan membentuk kurva seperti huruf U terbalik. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat akibat pergeseran tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri). Namun, setelah mencapai titik tertentu, ketimpangan akan menurun seiring dengan meningkatnya pemerataan kesempatan ekonomi, pendidikan, serta intervensi kebijakan pemerintah. Kurva ini menunjukkan bahwa ketimpangan merupakan fenomena sementara dalam proses pembangunan, namun tidak serta merta dalam selalu terjadi secara otomatis (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2002).

Secara mendalam, melalui pemikiran Kuznets juga berkaitan erat dengan tahapan pembangunan dan transformasi struktural dalam perekonomian. Kondisi pada tahap awal ditunjukkan dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan distribusi pendapatan yang relatif merata. Seiring dengan industrialisasi, terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor industri dan jasa yang memiliki produktivitas serta tingkat upah yang lebih tinggi, namun tidak merata. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin melebar. Pada tahapan yang lebih lanjut, ketika sektor modern semakin dominan dan akses terhadap pendidikan serta teknologi semakin luas, distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih merata.

Meskipun demikian, perkembangan literatur ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Hipotesis Kuznets. Dalam praktiknya, distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang berkembang selama proses pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan perlu dipahami melalui suatu kerangka yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan variabel pembangunan lainnya.

Salah satu kerangka yang menjelaskan hubungan tersebut adalah *development triangle* atau *triangle economy* yang dikembangkan oleh Bourguignon, (2004). Kerangka ini menempatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kemiskinan (*poverty*), dan ketimpangan pendapatan (*income inequality*) sebagai tiga dimensi utama pembangunan yang saling berinteraksi. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan. Sebaliknya, tingginya kemiskinan dan ketimpangan dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi sehingga hubungan antarvariabel tersebut bersifat timbal balik dan dinamis.

Implikasi dari kerangka *development triangle* adalah bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan tidak selalu menghasilkan pola yang sama pada setiap negara maupun periode pembangunan. Pada satu kondisi, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan sebagaimana dijelaskan dalam Hipotesis Kuznets, sedangkan pada kondisi lain pertumbuhan ekonomi justru mampu menurunkan ketimpangan apabila

disertai penurunan kemiskinan dan pemerataan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat gagal menciptakan pemerataan apabila masih diiringi oleh tingginya kemiskinan maupun tekanan inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat. Perbedaan karakteristik pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian Hipotesis Kuznets perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hubungan yang dapat muncul selama proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada kemiskinan dan inflasi sebagai variabel yang secara teoritis memiliki keterkaitan erat dengan distribusi pendapatan. Kemiskinan merepresentasikan dimensi pembangunan sosial yang menentukan kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi merepresentasikan stabilitas makroekonomi yang memengaruhi daya beli dan distribusi kesejahteraan. Kedua variabel tersebut dipandang dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, sehingga dimasukkan ke dalam model penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlakuan Hipotesis Kuznets di Indonesia.

Selanjutnya, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat absolut maupun relatif. Pengukurannya umumnya menggunakan pendekatan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, yang pada

akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan memiliki implikasi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Individu yang berada dalam kondisi miskin cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan daya beli tetapi juga mempersempit peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Perspektif ekonomi pembangunan mengkaji lingkaran kemiskinan yang stat dimana kondisi ketika rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya investasi pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan pada rendahnya produktivitas dan pendapatan (Todaro & Smith, 2015).

Korelasi atau hubungan dengan ketimpangan pendapatan, kemiskinan menjadi faktor yang berperan dalam memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Tingginya jumlah penduduk miskin mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah umumnya memiliki akses terbatas terhadap aset produktif, modal, dan peluang ekonomi, sehingga tertinggal dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar ketimpangan dan menghambat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Kuncoro, 2010)

Bukti empiris mengenai pengaruh kemiskinan terhadap pelebaran jurang ketimpangan dapat ditelaah lebih mendalam melalui studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. Syahri & Gustiara (2020) menemukan bahwa kemiskinan menjadi

determinan yang signifikan terhadap fluktuasi Indeks Gini di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya tingkat kemiskinan mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi sehingga manfaat pembangunan cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan lebih tinggi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan dan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang memperburuk distribusi pendapatan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ardiani & Prabowo (2024) yang membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan berbagai bukti empiris menunjukkan kemiskinan memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan temuan empiris tersebut, variabel kemiskinan perlu dimasukkan ke dalam model penelitian untuk mengendalikan pengaruh faktor sosial ekonomi yang turut memengaruhi distribusi pendapatan. Variabel tersebut perlu dimasukkan ke dalam model penelitian agar hasil estimasi yang diperoleh lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih komprehensif.

Melengkapi dinamika struktural antara pertumbuhan dan kemiskinan, stabilitas makroekonomi yang direpresentasikan oleh tingkat inflasi memiliki andil yang sangat krusial dalam membentuk postur distribusi pendapatan. Secara teoretis, inflasi tidak hanya berdampak pada pelemahan nilai tukar uang secara agregat, tetapi juga mendistorsi kesejahteraan masyarakat secara asimetris. (Bulir, 2001) mengonseptualisasikan inflasi sebagai sebuah bentuk "pajak regresif" (*regressive*

*tax*) yang secara langsung membebani dan menggerus daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah jauh lebih dalam dibandingkan kelompok kaya. Kelompok miskin rentan terhadap guncangan harga karena proporsi pengeluaran mereka didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pokok harian, dan mereka memiliki keterbatasan akses terhadap instrumen pelindung nilai aset (*inflation-hedging assets*) seperti properti atau saham. Sebaliknya, kelompok pendapatan menengah ke atas cenderung memiliki diversifikasi aset yang nilainya dapat terapresiasi dan menyesuaikan dengan laju inflasi. Ketidakseimbangan kemampuan dalam merespons gejolak harga inilah yang menyebabkan inflasi yang tidak terkendali secara otomatis akan memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

Dalam realitas perekonomian Indonesia selama rentang periode pengamatan 1990 hingga 2022, dinamika inflasi telah terbukti menjadi salah satu faktor penentu yang mendistorsi arah perbaikan distribusi pendapatan. Guncangan makroekonomi yang terjadi, terutama pada saat krisis moneter 1998, memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana lonjakan harga kebutuhan pokok dapat menghapus pencapaian pemerataan ekonomi yang telah dibangun secara bertahap sebelumnya.

Bukti empiris mengenai dampak regresif inflasi ini diperkuat oleh studi (Wulandari, Darmayuda, & Asrina, 2025), yang menemukan bahwa peningkatan tingkat inflasi secara konsisten memberikan dorongan positif terhadap perluasan ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pengujian Hipotesis Kuznets mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Tingkat inflasi mutlak harus

diintegrasikan sebagai variabel kontrol yang krusial untuk mengisolasi efek guncangan harga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fluktuasi ketimpangan yang diamati benar-benar merupakan hasil dari transisi struktural serta efektivitas pengentasan kemiskinan, bukan sekadar bias statistik yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan tersebut, relevansi pemikiran Kuznet dalam studi kasus yang terjadi di Indonesia menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan & Taher, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Relevansi Hipotesis Kuznets terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2004–2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris hipotesis Kuznets masih menemukan dukungan yang dalam hal ditunjukkan dengan penemuan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan non-linear terhadap ketimpangan pendapatan. Namun demikian, temuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika ketimpangan yang terjadi dalam konteks yang lebih panjang dan kompleks.

Adapun penelitian lain yang dilakukan di wilayah Indonesia secara makro dalam kawasan regional seperti penelitian (Oktarina & Yuliana, 2023) yang menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan serta menguji keberlakuan hipotesis Kuznets di Sumatera Barat. Melalui pendekatan deskriptif dan asosiatif dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) sebagai alat analisis, penelitian ini menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan dan pola hubungan yang terbentuk mengikuti kurva U terbalik.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh (Kurniawan & Huda, 2024) pada Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali berada pada kategori sedang dengan tren yang cenderung menurun selama periode penelitian. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat kuat dan bersifat negatif antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan pendapatan per kapita diikuti oleh penurunan ketimpangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis Kuznets masih menunjukkan inkonsistensi temuan empiris. Hal ini secara khusus pengujian hipotesis ada periode pasca krisis ekonomi 1998 hingga tahun 2022. Pasca Krisis Finansial Asia 1997, Indonesia mengalami proses pemulihan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh data ketimpangan seperti Gini Ratio, peningkatan pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan secara konsisten.

Inkonsistensi temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menyisakan persoalan teoritis maupun empiris yang belum dapat dijelaskan secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor pembangunan lainnya yang saling berinteraksi. Oleh karena itu,

pengujian Hipotesis Kuznets dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi juga menjelaskan berbagai kemungkinan hubungan yang muncul selama proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Secara teoritis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat satu arah. Salah satu kemungkinan hubungan tersebut adalah adanya hubungan dua arah (simultanitas) antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi ketimpangan, namun berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi juga dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi melalui penurunan kualitas sumber daya manusia, rendahnya investasi, hingga melemahnya konsumsi rumah tangga.

Selain hubungan kausal antarvariabel, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya keterkaitan antar indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan inflasi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang secara teoritis saling berkorelasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya menurunkan kemiskinan, sedangkan inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa periode 1992–2022 merupakan fase pembangunan ekonomi yang sangat relevan untuk menguji kembali keberlakuan Hipotesis Kuznets di Indonesia. Rentang waktu tersebut mencakup berbagai perubahan struktural, mulai dari Krisis Finansial Asia 1997–1998, masa pemulihan ekonomi, boom komoditas, perlambatan ekonomi global, pandemi

COVID-19, hingga fase pemulihan pascapandemi. Perbedaan karakteristik pada setiap fase pembangunan tersebut diduga memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan pendapatan sehingga memerlukan pengujian empiris yang lebih komprehensif.

Selain itu, belum adanya kesimpulan yang konsisten dari penelitian terdahulu serta keterbatasan cakupan penelitian yang umumnya bersifat regional menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian dalam skala nasional dengan periode waktu yang lebih panjang. Diperlukan suatu penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka panjang, dan menguji kembali keberlakuan hipotesis Kuznets dalam konteks empiris Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat ditarik penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 1992–2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Selama periode 1992–2022, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Berbagai peristiwa seperti krisis ekonomi 1998, krisis keuangan global 2008, perlambatan ekonomi, hingga pandemi COVID-19 menyebabkan dinamika pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan pendapatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan inflasi terhadap ketimpangan

pendapatan. Sebagian penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi ketimpangan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan ketimpangan atau membentuk hubungan nonlinier sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Kurva Kuznets. Perbedaan fenomena empiris dan hasil penelitian tersebut menjadi research problem yang mendasari pentingnya penelitian ini. Oleh karenanya maka pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022?
2. Apakah terdapat hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022 dengan mempertimbangkan model kuznet;
2. Menganalisis hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022;

3. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022; dan
4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, terutama dalam memahami interaksi antara kebijakan pertumbuhan dan stabilitas distribusi pendapatan, adapun manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut;

1. **Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengujian Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets dalam skala nasional yang terintegrasi dengan variabel kemiskinan dan stabilitas harga (inflasi). Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur empiris mengenai efektivitas pembangunan inklusif di negara berkembang dan memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor makroekonomi tersebut secara simultan membentuk dinamika ketimpangan di Indonesia dalam jangka panjang.

2. **Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu;

1. Bagi Pemangku Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Pusat, Bappenas, dan kementerian

terkait dalam mengevaluasi efektivitas strategi pembangunan nasional. Temuan mengenai keberlakuan Kurva Kuznets dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan transformasi struktural guna mempercepat pencapaian titik balik ketimpangan. Selain itu, bukti empiris mengenai peran instrumen bantuan sosial sebagai shock absorber diharapkan dapat memperkuat argumen bagi keberlanjutan program perlindungan sosial yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas distribusi pendapatan nasional.

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan mengenai bagaimana dinamika ekonomi nasional memengaruhi taraf hidup dan pemerataan pendapatan. Diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis dan sadar akan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.
3. Bagi praktisi ekonomi di Indonesia, Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Temuan mengenai peran kemiskinan dan inflasi sebagai variabel penentu distribusi pendapatan diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan "*policy mix*" yang tidak hanya mengejar pertumbuhan PDB, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan penguatan jaring pengaman sosial guna menekan angka ketimpangan..
4. Bagi mahasiswa, Menjadi referensi akademik dalam memahami aplikasi ekonometrika untuk menganalisis fenomena ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga dapat mendorong pengembangan studi

lanjutan yang lebih mendalam mengenai kualitas distribusi pendapatan dengan cakupan variabel atau metode analisis yang lebih luas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang tersusun dalam penelitian ini di antaranya disajikan sebagai berikut;

#### **Bab I      Pendahuluan**

Pada Bab ini menjelaskan secara berurutan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi konsep pertumbuhan ekonomi, konsep ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta teori hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berdasarkan pemikiran Simon Kuznets (hipotesis kurva U terbalik). Selain itu, bab ini juga mengkaji penelitian terdahulu yang relevan baik dalam konteks nasional maupun regional, serta menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **Bab III    Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder. Selain itu,

dijelaskan pula jenis dan sumber data, variabel penelitian yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, termasuk model ekonometrika yang digunakan dalam pengujian hipotesis Kuznets.

#### Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis. Pembahasan diawali dengan gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1992–2022. Selanjutnya, dilakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta pengujian keberlakuan hipotesis Kuznets. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk melihat apakah pola hubungan yang terbentuk sesuai dengan teori atau menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam konteks Indonesia.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diperlukan berdasarkan temuan tersebut.

FEB UNDIP

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan karena mencerminkan sejauh mana hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan sehingga manfaat pembangunan sering kali terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan kemampuan dalam memperoleh pendapatan, mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pembangunan suatu negara Todaro & Smith (2015).

Menurut Todaro & Smith (2015), ketimpangan ekonomi adalah kondisi ketika distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat tidak tersebar secara merata sehingga sebagian kecil penduduk menguasai proporsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Ketimpangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepemilikan faktor produksi, kualitas sumber daya manusia, akses terhadap modal, kesempatan kerja, serta kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga melalui kemampuan pembangunan tersebut dalam menciptakan pemerataan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi.

Pandangan tersebut sejalan dengan De Janvry & Sadoulet (2016) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan output nasional, tetapi juga pada distribusi manfaat pembangunan kepada seluruh masyarakat. Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan berpotensi memperbesar kesenjangan sosial, menurunkan mobilitas ekonomi masyarakat miskin, serta menghambat keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap aset produktif, kesempatan ekonomi, layanan publik, dan perlindungan sosial.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, tingkat ketimpangan umumnya diukur menggunakan beberapa indikator. Indikator yang paling banyak digunakan adalah Koefisien Gini (*Gini Coefficient*), yaitu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien Gini berada pada rentang 0 hingga 1 atau dapat dinyatakan dalam skala 0 hingga 100. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 atau 100 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dalam suatu wilayah (Todaro & Smith, 2015).

Koefisien Gini diperoleh dari Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*), yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif jumlah penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima. Apabila distribusi pendapatan merata, Kurva Lorenz akan berimpit dengan garis diagonal yang

disebut garis pemerataan sempurna. Sebaliknya, semakin jauh Kurva Lorenz menyimpang dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Oleh karena itu, Kurva Lorenz tidak hanya menjadi dasar dalam perhitungan Koefisien Gini, tetapi juga memberikan gambaran visual mengenai distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian (Todaro & Smith, 2015)

Selain Koefisien Gini, pengukuran ketimpangan regional juga sering menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini mengukur tingkat disparitas pembangunan antarwilayah dengan mempertimbangkan perbedaan pendapatan per kapita serta jumlah penduduk pada masing-masing daerah. Semakin besar nilai Indeks Williamson, semakin tinggi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Berbeda dengan Koefisien Gini yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan antarindividu atau rumah tangga, Indeks Williamson lebih banyak digunakan untuk menganalisis kesenjangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara sehingga sering diterapkan dalam penelitian ekonomi regional maupun pembangunan wilayah (Williamson, 1965).

Ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa perbedaan kepemilikan aset produktif, kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, akses terhadap teknologi, kesempatan kerja, serta kebijakan pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan distribusi pendapatan. Selain itu, perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa juga dapat meningkatkan ketimpangan apabila proses transformasi tersebut tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor

demografis, perkembangan teknologi, globalisasi, serta konsentrasi investasi di wilayah tertentu turut memperbesar perbedaan tingkat kesejahteraan antarindividu maupun antarwilayah.

Lebih lanjut, De Janvry & Sadoulet (2016) menekankan bahwa akar ketimpangan tidak hanya berasal dari perbedaan pendapatan, tetapi juga dari ketimpangan dalam kepemilikan aset produktif, seperti tanah, modal, pendidikan, dan akses terhadap pasar. Ketika masyarakat miskin memiliki keterbatasan terhadap aset-aset tersebut, mereka akan menghadapi hambatan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga kesenjangan ekonomi cenderung berlangsung secara antargenerasi. Oleh karena itu, distribusi aset menjadi salah satu determinan penting dalam menciptakan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Todaro & Smith (2015) menyatakan bahwa pembangunan yang berkualitas harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi memang mampu meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas aktivitas ekonomi, tetapi tanpa adanya pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi, manfaat pertumbuhan cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki modal, pendidikan, dan keterampilan yang lebih baik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh De Janvry & Sadoulet (2016) melalui konsep *inclusive growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuan perekonomian dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pembiayaan, pasar tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan menikmati manfaat pertumbuhan secara lebih merata.

Konsep pertumbuhan inklusif juga menempatkan distribusi aset sebagai prasyarat penting dalam mengurangi ketimpangan. Menurut De Janvry & Sadoulet (2016), pemerataan kepemilikan aset produktif akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan pendapatan, memperluas kesempatan berusaha, dan mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, apabila aset produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka manfaat pertumbuhan ekonomi akan semakin terkonsentrasi sehingga ketimpangan semakin melebar.

Selain distribusi aset, kualitas institusi dan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat ketimpangan. Institusi yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong terciptanya pasar yang kompetitif. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, sistem perpajakan yang progresif, belanja sosial, subsidi yang tepat sasaran, serta program

perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kebijakan redistribusi tersebut bertujuan agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

### **2.1.1.1 Kurva Kuznets (Inverted U Hypothesis)**

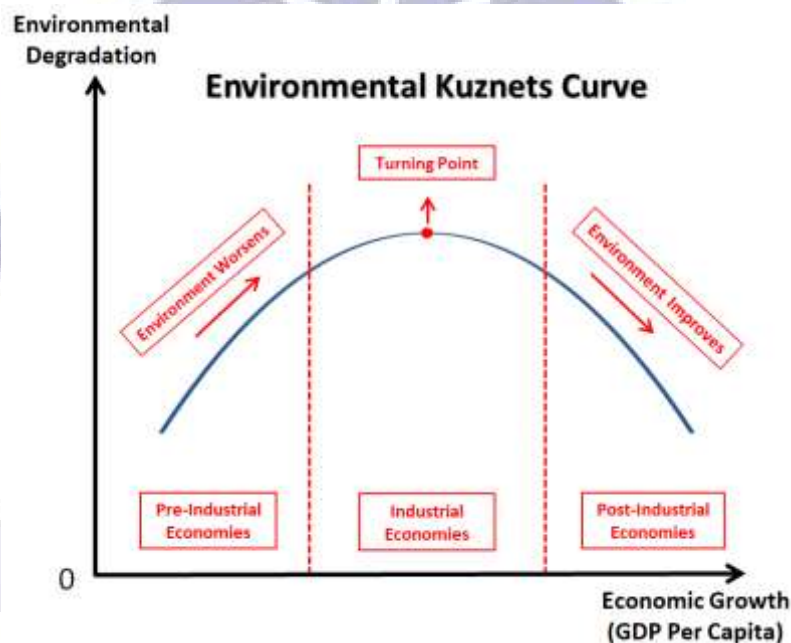
Hipotesis Kuznets (*Kuznets Inverted-U Hypothesis*) merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955 melalui penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan distribusi pendapatan di berbagai negara. Kuznets berpendapat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan membentuk pola kurva huruf U terbalik (*inverted U*), yaitu ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, mencapai titik maksimum pada tingkat pendapatan tertentu, kemudian menurun seiring meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara (Kuznets, 1955).

Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan sebagian besar tenaga kerja masih berada pada sektor pertanian yang memiliki tingkat produktivitas relatif rendah dengan distribusi pendapatan yang cenderung lebih merata. Seiring berlangsungnya industrialisasi dan transformasi struktural, tenaga kerja mulai berpindah ke sektor industri dan jasa yang menawarkan produktivitas serta tingkat upah yang lebih tinggi. Perbedaan pendapatan antara sektor tradisional

dan sektor modern menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat selama proses transformasi tersebut berlangsung.

Ketika proses pembangunan ekonomi telah mencapai tahap yang lebih maju, ketimpangan pendapatan diperkirakan mulai mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pendidikan, lapangan kerja produktif, teknologi, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah memungkinkan diterapkannya berbagai kebijakan redistribusi pendapatan sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata (Todaro & Smith, 2015). Melalui hipotesis tersebut dapat disajikan grafik sebagai berikut;

**Grafik 2.1 “Kuznets” U Terbalik**



Sumber: Ansari (2023)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita diikuti oleh meningkatnya

ketimpangan pendapatan. Setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu (*turning point*), ketimpangan mulai menurun seiring semakin meratanya kesempatan ekonomi dan meningkatnya efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan membentuk pola kurva U terbalik (*inverted U*).

Penjelasan mengenai pola tersebut kemudian dikembangkan oleh Robinson (1976) melalui teori transformasi struktural. Robinson menjelaskan bahwa peningkatan ketimpangan pada tahap awal pembangunan merupakan konsekuensi dari perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri. Selama kedua sektor memiliki rata-rata pendapatan yang berbeda, proses perpindahan tenaga kerja tersebut secara statistik akan meningkatkan ketimpangan. Namun, ketika sebagian besar tenaga kerja telah terserap ke sektor modern, distribusi pendapatan kembali menjadi lebih merata sehingga ketimpangan menurun.

Hipotesis Kuznets memiliki implikasi yang cukup besar dalam teori pembangunan ekonomi. Apabila hubungan tersebut bersifat kausal, maka meningkatnya ketimpangan pada tahap awal pembangunan dapat dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dari proses pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi secara berlebihan untuk mengurangi ketimpangan karena peningkatan pendapatan per kapita pada akhirnya akan memperbaiki distribusi pendapatan secara alami. Pandangan tersebut mendorong banyak negara berkembang pada dekade 1950-an hingga 1960-an untuk lebih

memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan pendapatan (Todaro & Smith, 2015).

Meskipun demikian, berbagai penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Hipotesis Kuznets tidak selalu berlaku secara universal. Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa hubungan yang ditemukan Kuznets didasarkan pada data lintas negara (*cross-sectional data*), sehingga lebih menggambarkan pola empiris antarnegara daripada hubungan sebab-akibat yang terjadi di masing-masing negara. Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita tidak secara otomatis menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan.

Temuan tersebut diperkuat oleh Deininger & Squire (1998) yang menunjukkan bahwa ketika karakteristik spesifik masing-masing negara diperhitungkan melalui model *fixed effects*, hubungan berbentuk kurva U terbalik cenderung menghilang. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa dinamika ketimpangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas institusi, distribusi aset, kebijakan fiskal, sistem pendidikan, perlindungan sosial, serta struktur pasar tenaga kerja.

Beberapa pengalaman negara juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pola distribusi pendapatan yang berbeda. Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia pernah mengalami *equalizing growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penurunan ketimpangan. Sebaliknya, Brasil berhasil menurunkan ketimpangan bukan semata-mata karena meningkatnya pendapatan per kapita, melainkan melalui berbagai kebijakan redistribusi seperti

program perlindungan sosial, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan publik (Todaro & Smith, 2015).

### **2.1.1.2 Segitiga Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, dan Kemiskinan**

Dalam ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dianalisis secara terpisah. Hubungan ketiganya dijelaskan oleh François Bourguignon melalui konsep Segitiga Pembangunan (*Development Triangle*) atau *Growth–Poverty–Inequality Triangle*, yang menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu aspek akan memengaruhi dua aspek lainnya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan tersebut dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan (De Janvry & Sadoulet, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan pendapatan yang telah ada sebelumnya. Apabila distribusi pendapatan relatif merata, maka manfaat pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga penurunan kemiskinan menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila ketimpangan pendapatan tinggi, manfaat pertumbuhan

cenderung terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi sehingga kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan menjadi lebih rendah (Bourguignon, 2004)

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan memiliki hubungan timbal balik yang membentuk suatu sistem. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan (*growth is good for poverty reduction*), terutama apabila pertumbuhan tersebut terjadi pada sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat miskin. Sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja (Ravallion, 2014).

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, ketimpangan dalam tingkat tertentu dapat memberikan insentif bagi investasi dan inovasi. Namun, apabila ketimpangan menjadi terlalu tinggi, kondisi tersebut justru menghambat pertumbuhan ekonomi melalui terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pembiayaan, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi juga dapat menurunkan kohesi sosial, meningkatkan konflik sosial, serta mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan sehingga pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (The World Bank, 2015).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan perubahan distribusi pendapatan yang sama pada setiap negara. Dollar & Kraay (2002) menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi bersifat *distribution*

*neutral*, yaitu peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat tidak selalu diikuti oleh perubahan tingkat ketimpangan. Akan tetapi, pengalaman empiris menunjukkan adanya variasi antarnegara. Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Vietnam, misalnya, berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan, tetapi juga disertai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, beberapa negara seperti Brasil mampu menurunkan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan melalui penerapan kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial yang efektif (Todaro & Smith, 2015).

Hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan juga bersifat langsung. Pada tingkat pendapatan rata-rata yang sama, negara dengan distribusi pendapatan yang lebih timpang akan memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan negara yang distribusi pendapatannya lebih merata. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat ketimpangan, semakin kecil kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kondisi distribusi pendapatan pada awal proses pembangunan (Bourguignon, 2004).

Bourguignon menjelaskan bahwa terdapat lima jalur utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan dalam Segitiga Pembangunan (*Development Triangle*). Pertama, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Kedua, tingkat kemiskinan awal memengaruhi kemampuan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ketimpangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti investasi, pendidikan, akses modal, dan stabilitas sosial.

Keempat, pertumbuhan ekonomi dapat bersifat netral, meningkatkan, maupun menurunkan ketimpangan tergantung pada karakteristik pertumbuhan yang terjadi. Kelima, ketimpangan yang tinggi akan meningkatkan tingkat kemiskinan pada tingkat pendapatan yang sama sehingga mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (De Janvry & Sadoulet, 2016). Melalui konsep tersebut dapat disajikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan sebagaimana pada grafik sebagai berikut;

**Grafik 2.2 Segitiga Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, dan Kemiskinan**



(De Janvry & Sadoulet, 2016)

Melalui Grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel tersebut saling memengaruhi secara simultan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi dampaknya sangat bergantung pada tingkat ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Di sisi lain, tingginya tingkat kemiskinan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan konsep Segitiga Pembangunan, strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan yang mampu memperbaiki distribusi pendapatan, memperluas akses masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih inklusif (*inclusive growth*) sehingga mampu menurunkan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan.

#### **2.1.1.1.3 Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas perekonomian dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, inflasi tidak hanya dipandang sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, investasi, serta distribusi pendapatan. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kajian mengenai hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Fischer (1993) dalam penelitiannya menyatakan bahwa stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator utama stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi. Menurut Fischer (1993), inflasi yang tinggi dan tidak stabil menciptakan ketidakpastian ekonomi (*macroeconomic uncertainty*) yang berdampak pada menurunnya investasi, rendahnya akumulasi modal, berkurangnya produktivitas,

serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara yang mampu menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil cenderung memiliki iklim investasi yang lebih baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Meskipun penelitian Fischer (1993) berfokus pada hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, implikasi teorinya juga menjelaskan bagaimana inflasi dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang secara langsung mengurangi daya beli masyarakat. Dampak tersebut umumnya lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset keuangan maupun aset riil yang nilainya dapat meningkat seiring terjadinya inflasi, sehingga dampak negatif inflasi terhadap kelompok ini relatif lebih kecil.

Selain menurunkan daya beli, inflasi juga menyebabkan penurunan nilai riil pendapatan masyarakat. Apabila kenaikan upah tidak mampu mengimbangi laju inflasi, maka pendapatan riil rumah tangga akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut terutama dialami oleh pekerja dengan pendapatan tetap, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi cenderung semakin melebar.

Inflasi yang tinggi juga dapat memengaruhi distribusi pendapatan melalui jalur investasi dan kesempatan kerja. Fischer (1993) menjelaskan bahwa

meningkatnya inflasi akan memperbesar ketidakpastian ekonomi sehingga dunia usaha cenderung menunda investasi. Penurunan investasi berdampak pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut meningkatkan risiko pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Easterly & Fischer (2001) yang menyatakan bahwa inflasi memberikan dampak yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin dibandingkan kelompok kaya. Masyarakat berpendapatan rendah umumnya memiliki aset keuangan yang terbatas sehingga tidak memiliki instrumen untuk melindungi nilai kekayaannya dari inflasi. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi cenderung memiliki aset seperti properti, saham, maupun investasi lainnya yang nilainya dapat meningkat ketika terjadi inflasi. Perbedaan kemampuan dalam menghadapi inflasi tersebut menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, Todaro & Smith (2015) menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepastian investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan berkepanjangan dapat mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki aset dan akses ekonomi yang lebih baik.

## 2.2 Hubungan antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang menunjukkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh karakteristik pertumbuhan serta kebijakan yang menyertainya.

Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan akibat terjadinya transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri. Kelompok masyarakat yang lebih dahulu memasuki sektor modern memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang masih berada di sektor tradisional sehingga kesenjangan pendapatan meningkat. Namun, setelah tingkat pendapatan per kapita mencapai titik tertentu (*turning point*), ketimpangan diperkirakan menurun seiring semakin luasnya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan, serta berkembangnya kebijakan redistribusi pendapatan (Kuznets, 1955).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Todaro & Smith (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu cenderung meningkatkan ketimpangan, sedangkan pertumbuhan

yang mampu menciptakan kesempatan kerja, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Selanjutnya, De Janvry & Sadoulet (2021) melalui konsep *inclusive growth* menjelaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi lebih penting dibandingkan besarnya pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap aset produktif, pendidikan, pembiayaan, dan kesempatan kerja sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bergantung pada sejauh mana pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan didukung oleh kebijakan redistribusi yang efektif.

### **2.2.2 Hubungan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan dua fenomena yang saling berkaitan dalam proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan ketimpangan menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Meskipun keduanya merupakan konsep yang berbeda, tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya berkorelasi dengan tingginya ketimpangan pendapatan.

Hubungan tersebut dijelaskan melalui *Growth–Poverty–Inequality Triangle* yang dikemukakan oleh Bourguignon (2004). Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan memiliki

hubungan timbal balik. Ketimpangan yang tinggi akan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, modal, teknologi, dan kesempatan kerja sehingga kesenjangan pendapatan semakin sulit dikurangi.

Menurut De Janvry & Sadoulet (2021), kemiskinan yang berlangsung dalam jangka panjang mencerminkan rendahnya kepemilikan aset produktif oleh kelompok masyarakat miskin. Keterbatasan tersebut menyebabkan produktivitas dan pendapatan mereka tetap rendah sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki modal dan akses ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi semakin timpang.

Todaro & Smith (2021) juga menjelaskan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dapat memperlebar ketimpangan karena masyarakat miskin memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut menghambat mobilitas ekonomi antargenerasi sehingga kesenjangan pendapatan terus berlanjut.

### **2.2.3 Hubungan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Selain memengaruhi stabilitas makroekonomi, inflasi juga memiliki implikasi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya

beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Fischer (1993) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mempersempit kesempatan kerja. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat dan meningkatnya kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi salah satu prasyarat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Easterly & Fischer (2001) menyatakan bahwa dampak inflasi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah cenderung mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih besar karena tidak memiliki aset yang mampu melindungi nilai kekayaannya dari inflasi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset riil maupun aset keuangan yang nilainya dapat meningkat ketika terjadi inflasi. Perbedaan kemampuan dalam menghadapi inflasi tersebut menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, Todaro & Smith (2021) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan melalui penurunan daya beli, berkurangnya kesempatan kerja, serta melemahnya akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar. Sebaliknya, inflasi yang terkendali akan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepastian investasi, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan suatu penelitian, diperlukan dukungan dari berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam penelitian ini, baik sebagai dasar teoritis maupun sebagai pembanding dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah jurnal ilmiah sebagai referensi utama. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut;

**Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Ardiani dan Prabowo (2024)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh, dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
2.	Istiqomah dan Floresti (2024)	<i>Economic Growth and Poverty: The Moderating Effect of Income Inequality</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Ketimpangan pendapatan terbukti memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan arah pengaruh negatif.
3.	Aisyah, Dahlan, & Aprila (2023)	Pengaruh Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan dan	Kuantitatif dengan metode regresi data panel dinamis	Pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan dan inflasi meningkatkan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan

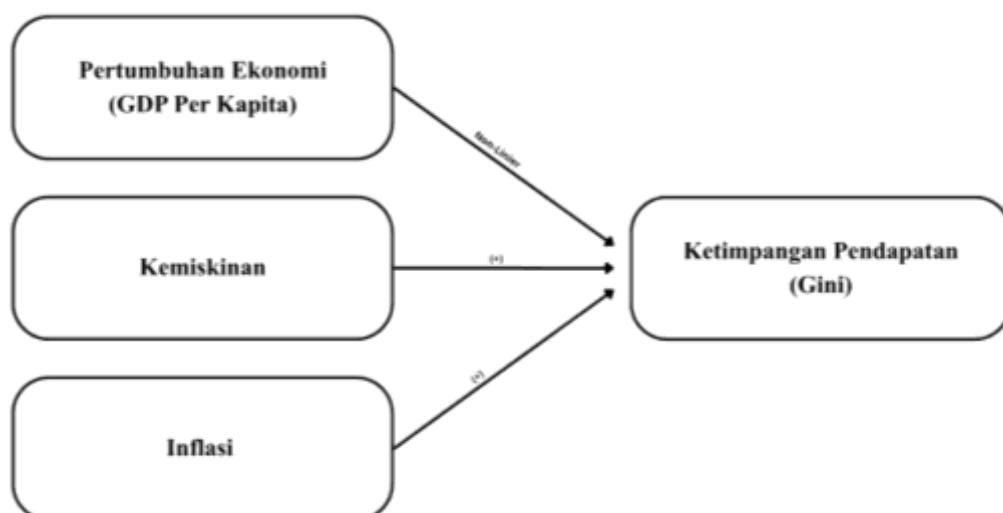
No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif dari Indonesia		pembangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti pemerataan pendapatan.
4.	Bulř (2001)	<i>Income Inequality: Does Inflation Matter?</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi ekonometrika	Inflasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Inflasi yang tinggi memperburuk distribusi pendapatan karena lebih membebani kelompok berpendapatan rendah.
5.	Wulandari, Darmayuda, & Asrina (2025)	Dampak Inflasi dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Riau	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Inflasi dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial, inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.
6.	Setiawan, Fasa, & Nuraziza (2025)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan Penduduk dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel Perspektif Ekonomi Islam	Kuantitatif dengan model regresi	Pertumbuhan ekonomi, rasio beban ketergantungan penduduk, dan IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
7.	Putri & Aminda (2024)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan	Kuantitatif dengan model regresi	Pengeluaran per kapita dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Upah

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Pendapatan di Provinsi DIY		minimum dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
8.	Pandiangam (2025)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Kuantitatif dengan model regresi	Pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik pada Grafik 2.3 sebagai berikut;

**Grafik 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber : Data Diolah (2026)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas sintesis antara teori pembangunan ekonomi klasik dan dinamika variabel makroekonomi dalam konteks Indonesia. Alur logika utama bertitik tolak pada pengujian Hipotesis Kurva U-Terbalik (Kuznets, 1955), di mana Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diposisikan sebagai variabel independen utama. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai pedang bermata dua; pada fase awal pembangunan, peningkatan PDB per kapita dihipotesiskan akan memperlebar jurang ketimpangan akibat pemusatan kapital pada sektor industri modern. Namun, seiring dengan kematangan ekonomi yang diwakili oleh variabel kuadrat dari PDB per kapita, kelanjutan pertumbuhan diproyeksikan akan mendorong pemerataan pendapatan melalui efek rembesan ke bawah (*trickle-down effect*) dan penguatan institusi distribusi. Oleh karena itu, hubungan antara PDB per kapita dan Indeks Gini dalam penelitian ini diasumsikan bersifat non-linear, membentuk pola parabola yang mencerminkan fase transisi struktural ekonomi Indonesia selama periode 1992-2022.

Lebih lanjut, kerangka konseptual ini diperkuat dengan mengintegrasikan tingkat kemiskinan dan inflasi sebagai variabel kontrol guna mengisolasi pengaruh murni dari pertumbuhan ekonomi. Masuknya variabel kemiskinan didasarkan pada logika jebakan kemiskinan (*poverty trap*), di mana tingginya populasi prasejahtera mencerminkan rendahnya aksesibilitas terhadap modal produktif yang secara langsung memicu pengutuban kekayaan (Todaro & Smith, 2015). Sementara itu, variabel inflasi dimasukkan untuk menangkap efek distorsi daya beli masyarakat. Mengacu pada teori pajak regresif, gejolak harga yang tidak terkendali akan

memberikan tekanan ekonomi yang lebih berat bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga secara otomatis memperluas jarak pendapatan dengan kelompok kaya (Buliř, 2001). Dengan menyatukan ketiga variabel tersebut, kerangka pemikiran ini memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana interaksi antara ekspansi output, kondisi kesejahteraan, dan stabilitas harga secara simultan membentuk wajah ketimpangan pendapatan di Indonesia.

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, di mana kebenarannya akan diuji secara empiris melalui serangkaian analisis data ekonometrika. Dalam konteks penelitian ini, perumusan hipotesis didasarkan pada sintesis mendalam terhadap teori pertumbuhan ekonomi non-linear Simon Kuznets, logika hambatan struktural akibat persentase kemiskinan yang persisten, serta dampak asimetris dari fluktuasi stabilitas harga atau inflasi terhadap distribusi pendapatan. Hipotesis-hipotesis berikut mencerminkan dugaan mengenai bagaimana dinamika transisi ekonomi dan variabel-variabel makroekonomi tersebut secara kolektif membentuk postur ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode pengamatan tahun 1992 hingga 2022;

1. H1: Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1992–2022;
2. H2: Diduga Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan non linier;

3. H3: Diduga Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1992–2022; dan
4. H4: Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1992–2022.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan mengandalkan analisis data sekunder. Merujuk pada Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, serta memiliki analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data kuantitatif pada dasarnya menghasilkan analisis numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika untuk mengukur dan menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel yang diteliti. Penelitian ini murni menggunakan data sekunder berjenis *time series* (runtun waktu), dengan jangka waktu pengamatan selama 31 tahun, yaitu dari tahun 1992 hingga 2022. Penggunaan data ini bertujuan untuk mengamati dinamika makroekonomi agregat di Indonesia. Data yang digunakan antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
3. Tingkat Kemiskinan di Indonesia
4. Tingkat Inflasi di Indonesia

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia seluruhnya diekstraksi dari publikasi resmi *World Bank* melalui portal *World Development Indicators* (WDI).

### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap setiap variabel agar dapat diukur secara empiris dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Adapun penjabaran indikator dan satuan dari masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Sumber Data
1.	Ketimpangan Pendapatan (GINI)	Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan antar-penduduk	Gini Ratio	Indeks (0–1)	World Bank
2.	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Perubahan nilai daya beli dan kapasitas produksi ekonomi riil.	Laju pertumbuhan PDB Per Kapita	US Dollar (\$)	World Bank
3.	Kemiskinan (KM)	Kondisi proporsi populasi yang taraf hidupnya di bawah kelayakan minimal.	Persentase penduduk miskin ( <i>Poverty headcount ratio</i> )	Persen (%)	World Bank
4.	Inflasi (INF)	Kecenderungan naiknya harga barang/jasa yang mendistorsi nilai tukar.	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Persen (%)	World Bank

Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

#### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan metrik yang menunjukkan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan antar-penduduk di

suatu negara. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan indikator rasio Indeks Gini Indonesia.

### 3.2.2 Variabel Independen

Ada beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator perkembangan daya beli dan kapasitas produksi ekonomi suatu negara. Data pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diprosikan melalui besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita riil masyarakat Indonesia.
2. Kemiskinan (KM) Kemiskinan mencerminkan kondisi proporsi populasi masyarakat yang taraf hidup dan daya belinya berada di bawah batas kelayakan hidup minimal. Data yang digunakan diukur melalui persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty headcount ratio*).
3. Inflasi (INF) Inflasi adalah indikator yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang dapat mendistorsi nilai tukar. Data inflasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase fluktuasi tahunan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional.

### 3.2.3 Transformasi dan Mean Centering GDP

Penelitian melakukan transformasi *mean centering* terhadap variabel pendapatan per kapita yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma

natural (lnGDP). Teknik *mean centering* dilakukan dengan mengurangi setiap nilai lnGDP terhadap nilai rata-ratanya sehingga menghasilkan variabel lnGDP\_c. Selanjutnya, variabel tersebut dikuadratkan untuk membentuk lnGDP\_c<sup>2</sup> yang digunakan dalam pengujian Hipotesis Kuznets.

Penggunaan *mean centering* bertujuan untuk mengurangi potensi multikolinieritas yang tinggi antara variabel lnGDP dan variabel kuadratnya (Dalal & Zickar, 2012). Dalam model regresi nonlinier seperti Kurva Kuznets, variabel pendapatan per kapita dan kuadrat pendapatan per kapita secara matematis memiliki hubungan yang sangat erat karena variabel kuadrat merupakan hasil transformasi langsung dari variabel asal. Kondisi tersebut sering menyebabkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menjadi sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan standar error koefisien regresi dan mengurangi stabilitas estimasi parameter. Melalui teknik *mean centering*, korelasi antara variabel linear dan variabel kuadrat dapat dikurangi tanpa mengubah bentuk hubungan nonlinier yang ingin diuji.

### 3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019), metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan atau ekstraksi arsip dan laporan yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi. Teknik ini disesuaikan dengan sumber data internasional, yaitu *World Bank*, yang menyediakan data sekunder berjenis deret waktu (*time series*) tahunan selama periode 1992–2022. Data yang didokumentasikan secara terpusat meliputi pertumbuhan ekonomi (PDB

per kapita), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), tingkat kemiskinan, serta tingkat inflasi. Seluruh data tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam perangkat lunak statistik Stata untuk diolah lebih lanjut.

### 3.4 Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuadratik (*polinomial*). Pendekatan ini digunakan secara khusus untuk mengakomodasi pengujian Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets, guna mendeteksi ada tidaknya pola hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, analisis regresi linier berganda ini juga mengukur arah dan besaran pengaruh variabel kontrol (kemiskinan) dan variabel makroekonomi tambahan (inflasi) terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara parsial maupun simultan.

### 3.5 Estimasi Model Regresi

Untuk mengukur kekuatan hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini merumuskan model ekonometrika yang memasukkan unsur kuadratik pada variabel pertumbuhan ekonomi. Model ini merepresentasikan pengujian empiris Kurva Kuznets, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahap awal diasumsikan memperlebar ketimpangan, namun pada titik tertentu akan berbalik menurunkannya.

Secara matematis, model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

$$GINI = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP)_{c_t} + \beta_2 [\ln(GDP)_{c_t}]^2 + \beta_3 KM_t + \beta_4 INF_t + \varepsilon$$

Adapun dari model tersebut dapat dijelaskan bahwa GINI merupakan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio,  $\ln\text{GDP}_c$  merupakan logaritma natural pertumbuhan ekonomi,  $\ln\text{GDP}_c^2$  merupakan logaritma natural kuadrat pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menguji keberlakuan Hipotesis Kuznets, KM merupakan tingkat kemiskinan, dan INF merupakan tingkat inflasi. Selanjutnya,  $\beta_0$  merupakan konstanta yang menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan ketika seluruh variabel independen bernilai nol, sedangkan  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , dan  $\beta_4$  merupakan koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun  $\varepsilon$  merupakan *error term* atau komponen galat yang mencerminkan pengaruh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi.

### **3.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Menurut Ghozali (2018), pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga estimasi parameter yang dihasilkan bersifat valid dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi sesuai dengan karakteristik model regresi yang digunakan.

#### **3.5.1.1 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Ghozali (2018),

(2003) deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (*homoskedastis*) atau tidak. Model yang baik mensyaratkan tidak adanya perbedaan varians residual antar observasi. Salah satu metode yang digunakan adalah uji *Breusch-Pagan*, yaitu dengan meregresikan kuadrat residual terhadap variabel independen dalam model. Jika nilai probabilitas ( $Prob > \chi^2$ ) lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### 3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Mengingat data yang digunakan adalah deret waktu (*time series*), uji autokorelasi wajib dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi antara *error term* pada periode  $t$  dengan *error term* pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Deteksi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)* atau *Breusch-Godfrey (LM Test)*. Jika nilai hitung berada di area bebas autokorelasi, maka model dinilai layak dan tidak bias terhadap waktu.

### 3.5.1.4 Deteksi Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik memiliki residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal sehingga hasil pengujian statistik menjadi lebih valid. Dalam penelitian ini, uji normalitas

dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk pada perangkat lunak Stata. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas ( $Prob > z$ ) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

### **3.5.2 Uji Statistik**

#### **3.5.2.1 Koefisien Determinasi (Goodness of Fit)**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Ghozali (2018), nilai  $R^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas (*goodness of fit*) yang baik.

#### **3.5.2.2 Uji F (Uji Simultan)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini menunjukkan kelayakan model secara keseluruhan.

#### **3.5.2.3 Uji t (Uji Parsial)**

Menurut Ghozali (2018), uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Statistik Deskriptif Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat runtut waktu (*time-series*) dari tahun 1992 hingga 2022 di Indonesia. Variabel yang diamati meliputi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), Pertumbuhan Ekonomi (PDB per kapita), Tingkat Kemiskinan, dan Inflasi. Sebelum melakukan pengujian model, analisis deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran umum serta rekam jejak historis dari pergerakan masing-masing variabel. Adapun data mentah yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Data Penelitian Makroekonomi Indonesia (1992-2022)**

Tahun	Indeks Gini	GDP per kapita	Kuadrat GDP per kapita	Tingkat Kemiskinan	Inflasi
1992	31.57	1617.11	2615044.752	14.03	7.29
1993	31.8	1693.11	2866621.472	13.5	19.15
1994	32.6	1790.33	3205281.509	14.83	7.78
1995	33.4	1905.54	3631082.692	16.17	9.88
1996	34.2	2020.99	4084400.58	17.5	8.68
1997	32.55	2081.84	4334057.786	19.47	12.57
1998	30.9	1780.2	3169112.04	21.44	75.27
1999	30.8	1767.51	3124091.6	23.4	14.16
2000	30.3	1828.1	3341949.61	19.1	20.45
2001	31.2	1868.59	3491628.588	18.4	14.3
2002	30.2	1926.37	3710901.377	18.2	5.9
2003	29.3	1991.92	3967745.286	17.4	5.49
2004	30.4	2065.71	4267157.804	16.7	8.55
2005	29.9	2155.45	4645964.703	16	14.33
2006	31.5	2244.08	5035895.046	17.8	14.09
2007	33.2	2355.15	5546731.523	16.6	11.26
2008	32.6	2464.6	6074253.16	15.4	18.15
2009	33.4	2546.22	6483236.288	14.1	8.27
2010	34.6	2670.81	7133226.056	13.3	15.26
2011	37.9	2799.62	7837872.144	12.5	7.47

Tahun	Indeks Gini	GDP per kapita	Kuadrat GDP per kapita	Tingkat Kemiskinan	Inflasi
2012	37.1	2930.52	8587947.47	12	3.75
2013	38.9	3055.24	9334491.458	11.4	4.97
2014	38.8	3170.72	10053465.32	11.3	5.44
2015	38.2	3288.22	10812390.77	11.2	3.98
2016	36.9	3416.81	11674590.58	10.9	2.44
2017	36.4	3553.52	12627504.39	10.6	4.29
2018	36.3	3701.32	13699769.74	9.8	3.82
2019	35.4	3850.9	14829430.81	9.4	1.6
2020	35.3	3739.45	13983486.3	9.8	-0.4
2021	35.5	3850.69	14827813.48	10.1	6
2022	35.5	4024.91	16199900.51	9.5	9.57

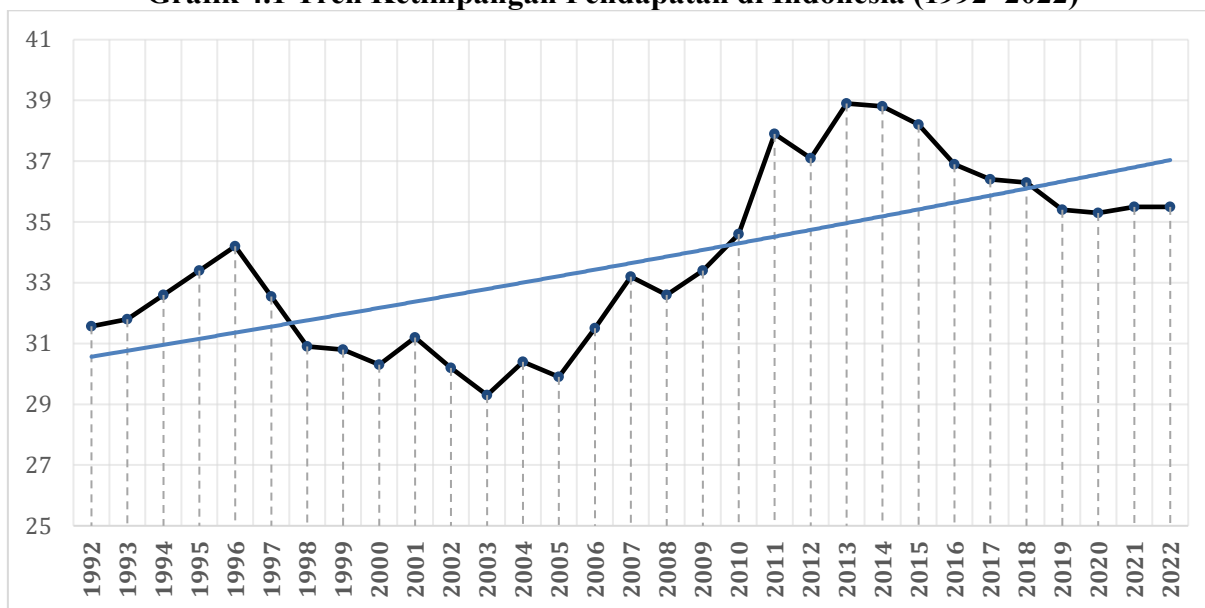
Sumber: Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dinamika perkembangan masing-masing variabel secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Deskripsi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan di tengah masyarakat. Perkembangan dan tren Indeks Gini di Indonesia selama periode 1992–2022 dapat dilihat secara visual pada Grafik 4.1 berikut:

SEMARANG  
FEB UNDIP

**Grafik 4.1 Tren Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (1992–2022)**

Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Grafik 4.1, pergerakan Indeks Gini di Indonesia sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, garis tren linier (garis lurus pada grafik) secara jelas menunjukkan tren jangka panjang yang positif atau cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa selama rentang waktu 31 tahun terakhir, ketimpangan distribusi pendapatan secara agregat di Indonesia justru mengalami pelebaran.

Jika dibedah berdasarkan fluktuasi kurvano, pergerakan tren ketimpangan ini dapat dibagi menjadi tiga fase utama:

#### 1. Fase Penurunan Pasca-Krisis (1992–2003)

Pada awal periode observasi (1992), Indeks Gini tercatat sebesar 31,57. Ketika terjadi guncangan Krisis Moneter 1997-1998, kurva ketimpangan pada grafik terlihat menekuk turun secara drastis hingga mencapai titik nadirnya di angka 29,30 pada tahun 2003. Penyetaraan angka ketimpangan ini bukan terjadi karena kelompok masyarakat bawah menjadi lebih

sejahtera, melainkan karena hancurnya nilai aset (saham, properti, simpanan) milik kelompok pendapatan atas akibat krisis, sebuah fenomena yang dalam literatur ekonomi kerap disebut "pemerataan kemiskinan" (*equalization of poverty*).

## 2. Fase Ekspansi dan Puncak Ketimpangan (2004–2014)

Memasuki dekade 2000-an, seiring dengan pemulihan ekonomi dan terjadinya *commodity boom* (lonjakan harga komoditas global), kurva Indeks Gini merangkak naik secara agresif. Tren ini terus mendaki tajam hingga menyentuh titik puncak tertingginya sebesar 38,90 pada tahun 2013 dan bertahan di level 38,80 pada tahun 2014. Laju kurva yang menanjak tajam ini mengindikasikan bahwa akumulasi kekayaan dari pertumbuhan ekonomi pada era tersebut mengalir lebih deras dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok pemilik modal.

## 3. Fase Pelandaian (2015–2022)

Sejak tahun 2015 hingga akhir periode observasi, grafik menunjukkan pergerakan yang mulai melandai dan stabil di kisaran level 35,30 hingga 35,50. Penurunan perlahan ini merupakan indikasi positif dari mulai berjalannya program perlindungan sosial, penyaluran dana desa, dan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih inklusif.

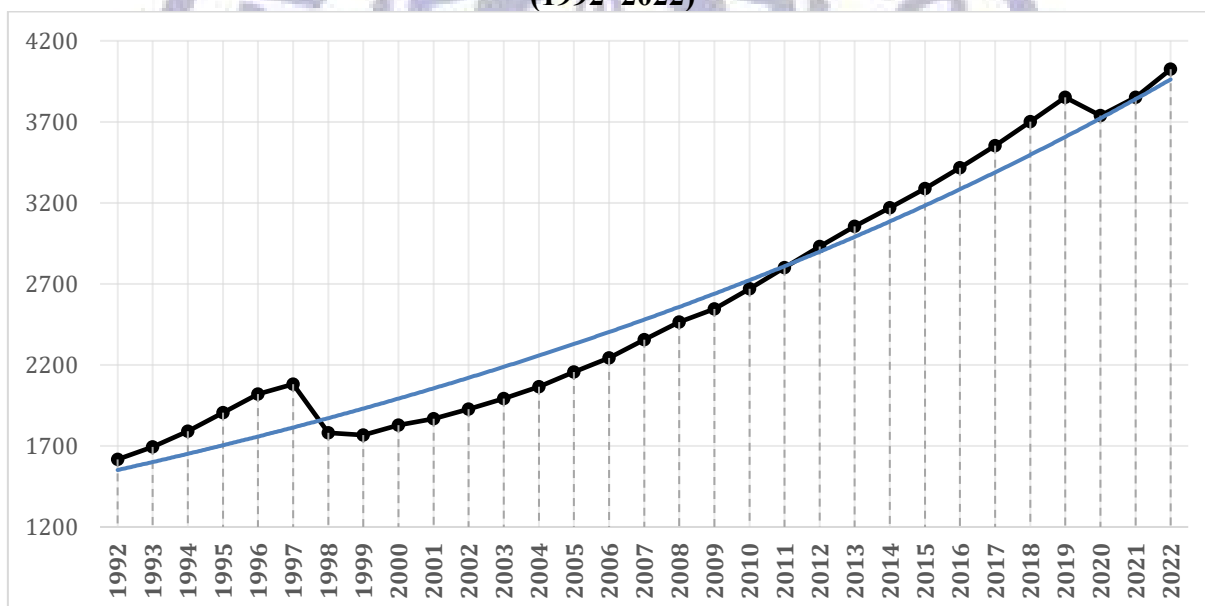
Meskipun terdapat fase pelandaian di akhir periode, posisi Indeks Gini pada tahun 2022 (35,50) masih berada jauh di atas posisi awalnya pada tahun 1992 (31,57). Selisih angka inilah yang menarik garis tren jangka panjang terus menanjak, sekaligus menegaskan bahwa upaya pemerataan distribusi pendapatan

masih menjadi tantangan struktural yang besar dalam dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia.

#### 4.1.2 Deskripsi Data Pertumbuhan Ekonomi (GDP per Kapita)

Pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita mencerminkan rata-rata daya beli riil dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dinamika pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1992–2022 dapat dilihat secara visual pada Grafik 4.2 berikut:

**Grafik 4.2 Tren Pertumbuhan Ekonomi (PDB per Kapita) di Indonesia (1992–2022)**



Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Grafik 4.2, kesejahteraan ekonomi Indonesia secara umum berada pada jalur ekspansi yang sangat solid. Hal ini dibuktikan oleh garis tren linier (garis lurus pada grafik) yang menunjukkan tren jangka panjang yang menanjak konsisten (positif). Dari hanya berada di level 1.617,11 US\$ pada tahun 1992, angka ini terus bertumbuh dan mencatatkan titik rekor tertingginya sebesar 4.024,91 US\$ pada akhir periode observasi di tahun 2022.

Jika mencermati pergerakan titik-titik pada kurva tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami beberapa fase penting yang diwarnai oleh dua anomali kontraksi utama:

1. Fase Awal dan Guncangan Krisis Asia (1992–1999)

Pada awal tahun 1990-an, grafik menunjukkan tren yang mulai menanjak seiring dengan proses industrialisasi. Namun, kurva mengalami patahan (kontraksi) yang sangat tajam pada tahun 1998. PDB per kapita anjlok drastis dari 2.081,84 US\$ (1997) menjadi 1.780,20 US\$ (1998) dan terus menyentuh titik dasarnya di 1.767,51 US\$ pada tahun 1999. Patahan kurva ini merupakan imbas langsung dari hancurnya fundamental ekonomi makro nasional saat diterjang badai Krisis Moneter Asia.

2. Fase Ekspansi Jangka Panjang (2000–2019)

Memasuki era milenium baru, grafik menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Selama hampir dua dekade berturut-turut, kurva PDB per kapita bergerak naik tanpa hambatan yang berarti, didorong oleh stabilitas politik pasca-reformasi, penguatan konsumsi domestik, dan siklus lonjakan harga komoditas global (*commodity boom*). Pada fase ini, daya beli masyarakat tumbuh pesat hingga menyentuh angka 3.850,90 US\$ pada tahun 2019.

3. Fase Pandemi dan Pemulihan (2020–2022)

Anomali kontraksi kedua yang terekam pada grafik terjadi pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang mematikan mobilitas dan aktivitas ekonomi memaksa PDB per kapita terkoreksi turun menjadi 3.739,45 US\$. Kendati

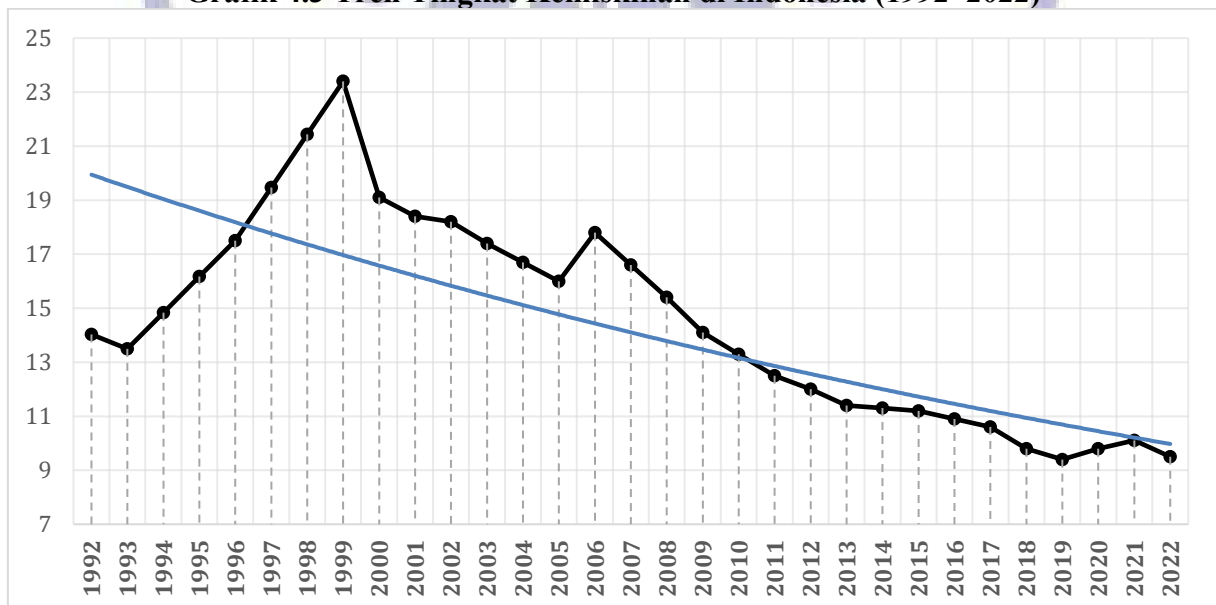
demikian, kurva dengan cepat kembali memantul (*rebound*) di tahun 2021 dan 2022, membuktikan resiliensi (ketahanan) ekonomi Indonesia.

Secara keseluruhan, tren garis yang konsisten menaik dari tahun 1992 hingga 2022 ini mencerminkan keberhasilan akumulasi modal dan transformasi perekonomian nasional. Tren pertumbuhan yang solid inilah yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama untuk menguji apakah ekspansi PDB per kapita ini berjalan selaras dengan pembentukan Kurva U-Terbalik Kuznets di Bab 4.4.

#### 4.1.3 Deskripsi Data Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator krusial yang mengukur porsi populasi yang gagal memenuhi standar hidup layak minimum. Dinamika persentase kemiskinan di Indonesia selama periode 1992–2022 dapat dilihat secara visual pada Grafik 4.3 berikut:

**Grafik 4.3 Tren Tingkat Kemiskinan di Indonesia (1992–2022)**



Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Grafik 4.3, meskipun pergerakan data dari tahun ke tahun tampak bergejolak pada paruh pertama periode observasi, garis tren linier (garis

lurus pada grafik) secara tegas menunjukkan arah yang menurun (slop negatif). Tren jangka panjang ini merupakan indikator yang sangat positif, menandakan bahwa secara absolut, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penyusutan selama tiga dekade terakhir.

Jika membedah lekukan kurva pada grafik secara lebih detail, pergerakan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase utama:

1. Fase Puncak Krisis (1992–1999)

Pada awal periode observasi, angka kemiskinan berada di kisaran 14,03%. Namun, kurva melonjak sangat tajam dan menyentuh rekor terburuknya sebesar 23,40% pada tahun 1999. Loncatan drastis ini merupakan *lagging effect* (efek rambatan) dari Krisis Moneter 1997/1998 yang meluluhlantakkan sektor perbankan, memicu hiperinflasi, dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang meruntuhkan daya beli masyarakat bawah.

2. Fase Pemulihan dan Guncangan Temporer (2000–2006)

Memasuki era 2000-an, grafik menunjukkan tren penurunan yang cukup baik hingga mencapai 16,00% pada 2005. Namun, kurva sempat kembali memantul naik menjadi 17,80% di tahun 2006. Anomali kenaikan ini utamanya dipicu oleh guncangan inflasi akibat kebijakan pemerintah memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir 2005, yang seketika menekan garis batas konsumsi kelompok rentan.

3. Fase Penurunan Konsisten (2007–2019)

Fase ini merupakan periode emas pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kurva menunjukkan garis keturunan yang sangat mulus dan konsisten. Puncaknya, pada tahun 2019, pemerintah berhasil menekan persentase kemiskinan menjadi 1 digit untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni sebesar 9,40%.

#### 4. Fase Pandemi dan Bantalan Sosial (2020–2022)

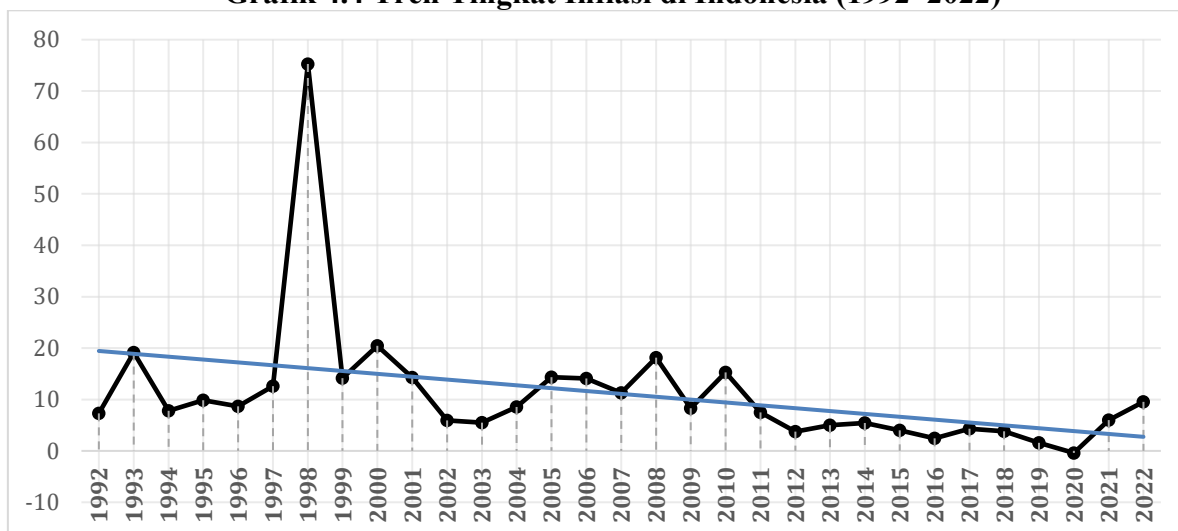
Pada akhir periode observasi, kurva kembali menunjukkan sedikit eskalasi. Pandemi COVID-19 mematikan mobilitas ekonomi sehingga mengungkit angka kemiskinan menjadi 9,80% (2020) dan 10,10% (2021). Beruntungnya, lonjakan ini tidak separah saat krisis 1998 karena pemerintah dengan cepat menebarkan jaring pengaman sosial yang masif (seperti BLT, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Prakerja). Efektivitas program ini terlihat dari kurva yang langsung kembali melandai turun ke level 9,50% pada tahun 2022.

Garis tren kemiskinan yang konsisten menurun ini memberikan sebuah wawasan penting, meskipun pada analisis sebelumnya (Grafik 4.1) ketimpangan relatif meningkat, namun secara absolut, kesejahteraan standar hidup minimum masyarakat Indonesia terus mengalami perbaikan yang signifikan.

#### 4.1.4 Deskripsi Data Inflasi

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang secara langsung mendistorsi nilai tukar riil dan daya beli masyarakat. Dinamika pergerakan inflasi di Indonesia selama rentang tahun 1992–2022 dapat dicermati pada Grafik 4.4 berikut:

**Grafik 4.4 Tren Tingkat Inflasi di Indonesia (1992–2022)**



Sumber: World Bank (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Grafik 4.4, pergerakan inflasi dari tahun ke tahun tampak sangat fluktuatif dengan beberapa lonjakan ekstrem (*spikes*). Namun, jika kita menarik garis tren linier (garis lurus pada grafik), terlihat jelas bahwa arah tren jangka panjangnya menurun (slop negatif). Hal ini mengindikasikan keberhasilan struktural otoritas moneter (Bank Indonesia) dan pemerintah dalam menjinakkan volatilitas harga dan menciptakan stabilitas makroekonomi selama tiga dekade terakhir.

Jika membedah gejala pada kurva grafik tersebut, dinamika inflasi Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat fase historis:

#### 1. Fase Gejala dan Hiperinflasi (1992–1999)

Pada era 1990-an, inflasi Indonesia cukup bergejolak (sempat menyentuh 19,15% pada 1993). Puncak anomali terburuk dalam sejarah terekam dengan sangat jelas pada grafik di tahun 1998, di mana kurva melonjak vertikal membentuk jurang tajam ke angka 75,27%. Kondisi *hyperinflation*

yang mencekik ini diakibatkan oleh hancurnya fundamental ekonomi dan depresiasi (pelemahan) ekstrem nilai tukar Rupiah saat Krisis Moneter Asia.

#### 2. Fase Guncangan Harga Energi/Subsidi (2000–2010)

Setelah berhasil keluar dari jerat krisis 1998, inflasi mulai turun namun masih diwarnai oleh beberapa lonjakan berkala yang membentuk "gigi gergaji" pada grafik. Guncangan harga yang mencolok terjadi pada kisaran tahun 2005 (14,33%) dan 2008 (18,15%). Lonjakan pada periode ini utamanya dipicu oleh faktor eksternal, yakni melambungnya harga minyak mentah global yang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian (pemotongan) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

#### 3. Fase Stabilisasi dan Deflasi Pandemi (2011–2020)

Memasuki dekade 2010-an, kurva inflasi mulai menunjukkan pergerakan yang melandai dan stabil di angka satu digit (di bawah 10%). Keberhasilan ini didorong oleh penerapan kerangka penargetan inflasi (*Inflation Targeting Framework*) yang lebih disiplin. Anomali paling langka pada fase ini terjadi di tahun 2020. Alih-alih mengalami inflasi, kurva menukik menembus garis nol dan mencatatkan deflasi sebesar -0,40%. Hal ini menjadi bukti sah betapa parahnya kejatuhan sisi permintaan (*demand shock*) agregat akibat pembatasan sosial besar-besaran (PSBB) selama pandemi COVID-19.

#### 4. Fase Eskalasi Pasca-Pandemi (2021–2022)

Di akhir periode observasi, grafik menunjukkan kurva yang kembali merangkak naik menuju 6,00% (2021) dan 9,57% (2022). Rebound inflasi

ini merupakan hal yang rasional seiring dengan pulihnya permintaan masyarakat pasca-pandemi dan adanya gangguan rantai pasok global pada tahun tersebut.

Tren jangka panjang yang menurun pada grafik ini memberikan sinyal penting bahwa secara historis, perekonomian Indonesia menjadi semakin stabil. Stabilitas harga ini nantinya akan menjadi landasan untuk membahas mengapa variabel inflasi memiliki hasil yang unik saat diujikan terhadap ketimpangan pendapatan di Bab 4.5.

#### 4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Setelah melihat pola pergerakan data dari tahun ke tahun, ringkasan rentang pemusatan data dan sebaran variansnya dapat dilihat melalui uji statistik deskriptif. Output analisis deskriptif ini disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (1992–2022)**

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Minimum	Maksimum
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	31	33.76	2.87	29.30	38.90
Pertumbuhan Ekonomi (GDP per kapita) (\$)	31	2585.66	773.34	1617.11	4024.91
Tingkat Kemiskinan (%)	31	14.57	3.79	9.40	23.40
Inflasi (%)	31	11.08	13.03	-0.40	75.27

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah observasi (*Obs*) yang digunakan adalah 31 titik yang merepresentasikan data dari tahun 1992 hingga 2022 tanpa ada data yang hilang (*missing value*). Rata-rata (*mean*) ketimpangan pendapatan berada di angka

33,76 dengan standar deviasi 2,87. Rata-rata pertumbuhan PDB per kapita adalah 2585,66 US\$ dengan persebaran data (standar deviasi) sebesar 773,34. Selanjutnya, persentase kemiskinan memiliki rata-rata 14,57%, sedangkan tingkat inflasi tahunan rata-rata berada pada angka 11,08%. Standar deviasi inflasi yang tinggi (13,03) menandakan besarnya jarak antara angka terendah (-0,40%) dengan gejala angka tertingginya (75,27%).

#### 4.1.6 Transformasi dan Mean Centering GDP

Sebelum dilakukan analisis regresi, variabel PDB per kapita terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural ( $\ln\text{GDP}$ ) dan dilanjutkan dengan proses mean centering. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan variabel yang lebih stabil serta mengurangi potensi multikolinearitas antara variabel PDB per kapita dan variabel kuadratnya yang digunakan dalam pengujian Hipotesis Kuznets. Selanjutnya, variabel hasil *mean centering* dikuadratkan sehingga diperoleh variabel  $\ln\text{GDP}_c^2$  yang digunakan dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh variabel  $\ln\text{GDP}_c$  dan  $\ln\text{GDP}_c^2$  yang selanjutnya digunakan sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Adapun hasil transformasi logaritma natural dan mean centering PDB per kapita disajikan pada tabel berikut;

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Hasil Transformasi dan Mean Centering PDB per Kapita**

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
$\ln\text{GDP}_c$	31	-6.83e-09	0.2925214	-0.4273358	0.4845261

---

$\ln\text{GDP\_C}_t^2$	31	0.0828085	0.0667537	0.0000354	0.2347655
------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------

---

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

---

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa variabel  $\ln\text{GDP\_c}$  memiliki nilai rata-rata sebesar  $-6,83\text{E-}09$  atau mendekati nol. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses *mean centering* telah dilakukan dengan baik, karena rata-rata variabel setelah dikurangi dengan nilai rata-ratanya menjadi mendekati nol. Selain itu, variabel  $\ln\text{GDP\_c}$  memiliki nilai minimum sebesar  $-0,4273$  dan nilai maksimum sebesar  $0,4845$  dengan standar deviasi sebesar  $0,2925$ , yang menunjukkan adanya variasi data PDB per kapita di sekitar nilai rata-ratanya.

Sementara itu, variabel  $\ln\text{GDP\_c}_t^2$  yang merupakan hasil kuadrat dari variabel  $\ln\text{GDP\_c}_t$  memiliki nilai rata-rata sebesar  $0,0828$  dengan standar deviasi sebesar  $0,0668$ . Nilai minimum variabel ini sebesar  $0,0000354$  dan nilai maksimum sebesar  $0,2348$ . Seluruh nilai pada  $\ln\text{GDP\_c}_t^2$  bernilai positif karena merupakan hasil proses pengkuadratan. Variabel  $\ln\text{GDP\_c}_t^2$  digunakan untuk merepresentasikan hubungan nonlinier antara PDB per kapita dan ketimpangan pendapatan dalam pengujian Hipotesis Kuznets.

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan prasyarat statistik mutlak yang wajib dipenuhi sebelum melakukan interpretasi terhadap model regresi linier berganda yang diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Tujuan utama dari pelaksanaan uji ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan model dan memastikan bahwa parameter yang dihasilkan memenuhi kriteria kelayakan

ekonometrika, yakni *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Artinya, estimasi yang dihasilkan oleh model harus dipastikan efisien, konsisten, dan tidak bias.

Untuk memastikan bahwa model regresi ekonometrika dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *BLUE* dan sah digunakan untuk pengujian hipotesis, maka dilakukan empat tahapan pengujian asumsi klasik. Serangkaian pengujian tersebut meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas residual yang hasilnya diuraikan sebagai berikut:

#### 4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi linier yang kuat antar-variabel independen di dalam model regresi. Pendeteksian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana model dinyatakan bebas dari multikolinearitas yang membahayakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ). Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	VIF	1/VIF
Pertumbuhan Ekonomi	101.36	0.009866
Pertumbuhan Ekonomi Kuadrat	99.03	0.010098
Kemiskinan	4.21	0.237441
Inflasi	1.47	0.681412
<b>Mean VIF</b>	<b>51.52</b>	

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4, masih dijumpai hasil uji Variance Inflation Factor (VIF) pada Stata yang berada pada rentang nilai sekitar 101,36 dan 99,03 yang menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas yang sangat tinggi antar variabel

independen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat di antara variabel bebas yang digunakan dalam model, sehingga dapat mengganggu ketepatan estimasi koefisien regresi.

Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan transformasi berupa *centered mean (mean-centering)*, yaitu dengan mengurangi setiap nilai variabel terhadap nilai rata-ratanya. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi korelasi antar variabel independen tanpa mengubah makna substantif dari data, sehingga diharapkan dapat memperbaiki stabilitas estimasi model regresi.

Kemudian, hasil data setelah dilakukan transformasi tersebut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Centered Mean**

Variable	VIF	1/VIF
Pertumbuhan Ekonomi ( <i>Centered Mean</i> )	3.42	0.292079
Pertumbuhan Ekonomi Kuadrat ( <i>Centered Mean</i> )	1.26	0.794075
Kemiskinan	4.39	0.227778
Inflasi	1.49	0.671341
<b>Mean VIF</b>	<b>2.64</b>	

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang berada di bawah batas kritis 10. Variabel  $\ln\text{GDP}_c$  memiliki nilai VIF sebesar 3,42, variabel  $\ln\text{GDP}_c^2$  sebesar 1,26, variabel kemiskinan (KM) sebesar 4,39, dan variabel inflasi (INF) sebesar 1,49. Selain itu, nilai mean VIF yang diperoleh sebesar 2,64.

Nilai *tolerance* yang ditunjukkan oleh kolom  $1/VIF$  juga seluruhnya berada di atas 0,10, yaitu masing-masing sebesar 0,292079 untuk  $\ln GDP_{c,t}$ , 0,794075 untuk  $\ln GDP_{c,t}^2$ , 0,227778 untuk  $KM_t$ , dan 0,671341 untuk  $INF_t$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian.

Model regresi telah terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil ini juga menunjukkan bahwa penerapan transformasi logaritma natural dan *mean centering* pada variabel PDB per kapita berhasil mengurangi potensi multikolinearitas yang umumnya muncul antara variabel utama dan variabel kuadratnya dalam pengujian Hipotesis Kuznets, sehingga model layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

#### 4.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan adanya varians yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *Breusch-Pagan / Cook-Weisberg*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai probabilitas ( $Prob > \chi^2$ ) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka model dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg Test)**

Metode Pengujian	Chi2(1)	Prob>chi2	Kesimpulan
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg	0.00	0.9942	Bebas Heterokedastisitas

---

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

---

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan nilai probabilitas ( $\text{Prob} > \chi^2$ ) sebesar 0,9942. Nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0,05 ( $0,9942 > 0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa varians residual bersifat konstan dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa *varians error* dalam model adalah homoskedastis, sehingga estimasi koefisien regresi yang dihasilkan bersifat efisien dan memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linear.

#### 4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*error term*) pada periode ( $t$ ) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Masalah ini sangat rentan terjadi pada penelitian yang menggunakan data deret waktu (*time series*). Pada pengujian awal menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test*, ditemukan adanya gejala autokorelasi yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas di bawah 0,05.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi**

*Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation*

<b>lags(p)</b>	<b>chi2</b>	<b>Df</b>	<b>Prob &gt; chi2</b>
1	15.641	1	0.0001

$H_0$ : no serial correlation

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey LM test* dengan lag ( $p$ ) = 1. Hasil pengujian memperoleh nilai chi-square

sebesar 15,641 dengan derajat kebebasan ( $df$ ) = 1 serta nilai probabilitas ( $Prob > chi^2$ ) sebesar 0,0001. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,0001 < 0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat korelasi serial (*no serial correlation*) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami gejala autokorelasi.

Selanjutnya, unntuk mengatasi permasalahan autokorelasi yang terdeteksi melalui uji *Breusch–Godfrey*, penelitian ini menggunakan metode penyembuhan menggunakan transformasi *Cochrane-Orcutt Autoregressive AR(1)*. Keberhasilan transformasi ini dievaluasi menggunakan indikator statistik *Durbin-Watson (DW)*, di mana model dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai DW berada di sekitar angka 2.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Penyembuhan Autokorelasi (Metode *Cochrane-Orcutt*)**

Pengujian	Nilai Durbin-Watson (DW)	Kesimpulan
Sebelum Transformasi (original)	0.584126	Terdapat Autokorelasi
Setelah Transformasi (Transformed)	2.085205	Bebas Autokorelasi

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai statistik Durbin–Watson sebelum transformasi sebesar 0,584126, yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif pada model regresi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan transformasi menggunakan metode *Cochrane–Orcutt Autoregressive AR(1)*. Hasil transformasi menunjukkan bahwa nilai statistik Durbin–Watson meningkat menjadi 2,085205.

Nilai Durbin–Watson setelah transformasi berada sangat dekat dengan angka 2, yang mengindikasikan bahwa korelasi serial antar-residual telah berhasil

diminimalkan. Dengan demikian, metode Cochrane–Orcutt terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan autokorelasi yang sebelumnya terdeteksi pada model regresi. Oleh karena itu, model hasil transformasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian.

#### 4.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual (kesalahan pengganggu) dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini krusial karena validitas Uji t dan Uji F sangat bergantung pada asumsi normalitas residual. Pendeteksian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Shapiro-Wilk W Test*. Kriteria pengujian menetapkan bahwa apabila probabilitas ( $\text{Prob}>z$ ) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan data residual berdistribusi normal dapat diterima.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas (*Shapiro-Wilk Test*)**

<i>Shapiro-Wilk W test for normal data</i>					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	31	0.97454	0.829	-0.388	0.18261

Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.9, perolehan nilai probabilitas ( $\text{Prob}>z$ ) dari residual model adalah sebesar 0,18261. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ( $0,18261 > 0,05$ ). Hasil ini mengonfirmasi bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi dinilai sah dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian statistik dan hipotesis.

### 4.3 Estimasi Model Regresi

Setelah model dipastikan terbebas dari pelanggaran asumsi klasik melalui transformasi *Cochrane-Orcutt*, tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil estimasi regresi linier berganda dengan pendekatan kuadratik. Pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk menguji keberadaan Hipotesis Kurva Kuznets di Indonesia selama periode 1992–2022.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak Stata, diperoleh *output* estimasi regresi yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda (Metode Cochrane-Orcutt)**

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
Pertumbuhan Ekonomi (GDP)	9.886605	4.555841	2.17	0.040
Kuadrat Pertumbuhan Ekonomi (GDP <sup>2</sup> )	-10.19941	8.081210	-1.26	0.219
Tingkat Kemiskinan (KM)	0.0407849	0.1959054	0.21	0.837
Inflasi (INF)	0.0012384	0.0155916	0.08	0.937
Konstanta	33.34845	3.286044	10.15	0.000
Keterangan: Signifikan pada tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ )				
R-Squared	0.2947			
F-Statistik	2.61			
Prob (F-Statistik)	0.0596			
Jumlah Observasi (n)	: 30			
Sumber: Output Stata, Data Diolah (2026)				

Secara matematis, model persamaan regresi yang terbentuk dari hasil estimasi di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{GINI} = 33.3485 + 9.8866 \ln \text{GDP}_{-c_t} - 10.1994 \ln \text{GDP}_{-c_t^2} + 0.0408 \text{KM}_t + 0.0012 \text{INF}_t + \varepsilon$$

Selanjutnya, jumlah observasi pada model *Cochrane–Orcutt* berkurang dari 31 menjadi 30 observasi. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari prosedur transformasi autoregresif orde pertama (*first-order autoregressive transformation*) yang digunakan dalam metode *Cochrane–Orcutt*. Metode ini terlebih dahulu mengestimasi parameter autokorelasi orde pertama ( $\rho$ ), kemudian mentransformasikan model menggunakan nilai parameter tersebut. Karena proses transformasi memerlukan nilai observasi pada periode sebelumnya (*lag*), observasi pertama tidak memiliki nilai *lag* yang dapat digunakan sehingga tidak dapat ditransformasikan. Akibatnya, observasi pertama secara otomatis dikeluarkan dari proses estimasi dan jumlah observasi efektif berkurang menjadi 30.

#### 4.4 Uji Statistik dan Pengujian Hipotesis

Pengujian statistik dilakukan untuk mengukur kesesuaian model (*goodness of fit*) dan membuktikan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Pengujian ini didasarkan pada *output* regresi linier berganda yang telah disembuhkan dari autokorelasi menggunakan transformasi *Cochrane-Orcutt*.

##### 4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar porsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan secara komprehensif oleh variabel-variabel independen dalam model. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,2947 atau 29,47%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi tingkat ketimpangan pendapatan yang diproksikan

dengan Indeks Gini di Indonesia selama periode 1992-2022 dapat dijelaskan oleh variabel logaritma natural pertumbuhan ekonomi ( $\ln(GDP)_{c_t}$ ), logaritma natural kuadrat pertumbuhan ekonomi ( $[\ln(GDP)_{c_t}]^2$ ), tingkat kemiskinan ( $KM_t$ ), dan inflasi ( $INF_t$ ) sebesar 29,47%. Sementara itu, 70,53% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi, seperti tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, distribusi aset, investasi, maupun faktor sosial dan institusional lainnya.

Meskipun nilai  $R^2$  yang diperoleh tergolong moderat, hasil tersebut masih dapat diterima mengingat penelitian ini menggunakan data makroekonomi time series yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks di luar variabel yang diteliti. Oleh karena itu, model tetap mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

#### 4.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan metode *Cochrane–Orcutt*, diperoleh nilai F-statistik sebesar 2,61 dengan nilai  $\text{Prob} > F$  sebesar 0,0596. Pada tingkat signifikansi 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ), nilai probabilitas tersebut lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,0596 > 0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak dapat ditolak. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kuadrat pertumbuhan

ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat signifikansi 5 persen.

Namun demikian, apabila menggunakan tingkat signifikansi 10 persen ( $\alpha = 0,10$ ) yang juga cukup umum digunakan dalam penelitian ekonomi dan sosial, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,0596 < 0,10$ ). Oleh karena itu, model dapat dikatakan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen masih memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun tingkat signifikansinya relatif lebih lemah dibandingkan standar 5 persen.

#### 4.4.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, sekaligus sebagai pembuktian atas hipotesis penelitian.

##### 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan:

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 4.8, hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dijelaskan melalui dua indikator variabel, yaitu logaritma natural Pertumbuhan Ekonomi ( $\ln(GDP)_{c_t}$ ) dan logaritma natural Kuadrat Pertumbuhan Ekonomi ( $[\ln(GDP)_{c_t}]^2$ ):

##### a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $\ln(GDP)_{c_t}$ )

Variabel pertumbuhan ekonomi ( $\ln(GDP)_{c_t}$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 9,886605 dengan nilai t-hitung sebesar 2,17 dan probabilitas sebesar 0,040. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat

signifikansi 5 persen ( $0,040 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu dan menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat.

b. Variabel Kuadrat Pertumbuhan Ekonomi ( $[\ln(GDP)_{c_t}]^2$ )

Variabel kuadrat pertumbuhan ekonomi ( $[\ln(GDP)_{c_t}]^2$ ) memiliki nilai koefisien sebesar -10,19941 dengan nilai t-hitung sebesar -1,26 dan probabilitas sebesar 0,219. Meskipun koefisien regresi bertanda negatif, nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ( $0,219 > 0,05$ ), sehingga secara parsial variabel kuadrat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Arah koefisien yang negatif secara teoritis menunjukkan kecenderungan hubungan nonlinier yang mengarah pada pola kurva U-terbalik (Hipotesis Kuznets). Namun, karena pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, penelitian ini belum memperoleh bukti empiris yang cukup untuk menyatakan bahwa

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia mengikuti pola Hipotesis Kuznets selama periode 1992–2022.

Secara keseluruhan, koefisien linear ( $\ln(GDP)_{c_t}$ ) yang bertanda positif dan koefisien kuadrat  $[\ln(GDP)_{c_t}]^2$  yang bertanda negatif mengindikasikan adanya kecenderungan hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, sebagaimana dijelaskan dalam Hipotesis Kuznets. Namun, karena koefisien kuadrat tidak signifikan secara statistik, penelitian ini belum memperoleh bukti empiris yang memadai untuk mengonfirmasi keberlakuan Kurva Kuznets di Indonesia selama periode 1992–2022. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, pola hubungan berbentuk kurva U-terbalik belum dapat dibuktikan.

## 2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.10, variabel tingkat kemiskinan (KM<sub>i</sub>) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0407849 dengan nilai t-hitung sebesar 0,21 dan probabilitas sebesar 0,837. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ( $0,837 > 0,05$ ), sehingga secara parsial tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun koefisien regresi bertanda positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan,

hubungan tersebut tidak didukung oleh bukti statistik yang memadai. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan selama periode 1992–2022 belum mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti distribusi kepemilikan aset, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta struktur perekonomian. Dengan demikian, Hipotesis Kedua ( $H_2$ ) ditolak, yang berarti tingkat kemiskinan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

### 3. Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 4.10, variabel inflasi ( $INF_t$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0012384 dengan nilai t-hitung sebesar 0,08 dan probabilitas sebesar 0,937. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ( $0,937 > 0,05$ ), sehingga secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun koefisien regresi bertanda positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, hubungan tersebut tidak didukung oleh bukti statistik yang memadai.

Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode 1992–2022 belum mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan

pendapatan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti struktur pasar tenaga kerja, distribusi kepemilikan aset, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan ekonomi yang memengaruhi distribusi pendapatan. Dengan demikian, Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) ditolak, yang berarti variabel inflasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

Sub-bab ini membahas secara komprehensif temuan empiris yang dihasilkan dari pengujian statistik, dengan mengkorelasikan hasil tersebut pada kerangka teoritis, kajian literatur terdahulu, serta konteks dinamika ekonomi riil di Indonesia selama kurun waktu 1992–2022.

##### **4.5.1 Hubungan Non-Linear Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan (Pembuktian Kurva Kuznets)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap modal, pendidikan, teknologi, dan kesempatan usaha, sehingga kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih tetap terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama periode penelitian belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015) yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, proses pertumbuhan umumnya terkonsentrasi pada sektor-sektor modern dan wilayah yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Akibatnya, distribusi manfaat pembangunan menjadi tidak merata karena kelompok masyarakat yang telah memiliki sumber daya ekonomi lebih mampu memanfaatkan peluang yang tercipta dibandingkan kelompok masyarakat yang masih berada pada sektor tradisional. Dalam kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Lebih dalamnya, secara empiris, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Witari dan Saidi (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan akibat adanya efek polarisasi pembangunan. Aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah yang lebih maju cenderung menarik sumber daya ekonomi, investasi, dan tenaga kerja berkualitas dari daerah lain sehingga manfaat pertumbuhan tidak tersebar secara merata. Fenomena tersebut masih dapat diamati dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia yang selama beberapa dekade menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu.

Di sisi lain, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan pola yang sejalan dengan Hipotesis Kurva Kuznets. Pola tersebut menggambarkan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan ketimpangan

pendapatan, sedangkan pada tahap pembangunan yang lebih maju ketimpangan cenderung menurun seiring dengan semakin luasnya distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian belum memberikan bukti empiris yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa pola Kurva U-Terbalik Kuznets telah terjadi secara nyata di Indonesia. Oleh karena itu, hubungan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya kecenderungan hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan daripada sebagai konfirmasi penuh terhadap Hipotesis Kuznets.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Sari (2021) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pola yang lebih konsisten dengan Hipotesis Kuznets. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh variasi periode penelitian, karakteristik data yang digunakan, cakupan wilayah pengamatan, serta pendekatan analisis yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi masih menjadi faktor yang berperan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia, namun proses transformasi ekonomi yang mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan belum berlangsung secara optimal.

#### **4.5.2 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berlawanan dengan Hipotesis 2 (H2), hasil pengujian membuktikan bahwa fluktuasi tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia. Temuan ini menghadirkan anomali empiris terhadap asumsi teoretis arus utama, khususnya

*grand theory* dari Todaro dan Smith (2015) yang mempostulatkan bahwa kemiskinan merupakan hambatan struktural yang akan selalu berbanding lurus dengan pelebaran kesenjangan pendapatan. Namun, realitas empiris di Indonesia selama periode 1992–2022 menunjukkan fenomena distribusi yang berbeda.

Ketidaksignifikanan variabel kemiskinan ini dapat dijelaskan melalui struktur sumber pendapatan rumah tangga miskin di Indonesia yang cenderung homogen. Mayoritas masyarakat prasejahtera bergelut di sektor informal atau agraris berskala subsisten dengan tingkat upah yang stagnan. Akibatnya, ketika persentase angka kemiskinan secara nasional mengalami fluktuasi (naik atau turun), hal tersebut tidak memicu perombakan yang radikal terhadap peta distribusi pendapatan agregat antar-desil secara keseluruhan.

Lebih jauh, secara fundamental ketidaksignifikanan ini membuktikan keberhasilan fungsi "bantalan sosial" (*shock absorber*) yang diinisiasi oleh pemerintah. Sejak era krisis hingga rentang guncangan pandemi COVID-19, pemerintah secara agresif menggulirkan berbagai instrumen jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga subsidi energi. Argumen ini sejalan dengan temuan Suarni dkk. (2022) serta Anggraeni dan Nugroho (2022)), yang mengonfirmasi bahwa intervensi program seperti PKH dan BPNT sangat krusial dalam menahan batas bawah konsumsi kelompok rentan. Program-program intervensi langsung ini secara efektif mencegah memburuknya kedalaman kemiskinan (*poverty severity*), sehingga kelompok bawah dijaga agar tidak semakin terperosok menjauhi jarak pendapatan kelas menengah.

Keberhasilan instrumen perlindungan sosial dalam menetralisasi dampak kemiskinan terhadap ketimpangan ini juga didukung oleh literatur terbaru dari Zega et al. (2025), yang membuktikan bahwa program bantuan sosial pemerintah memiliki peranan vital dalam meredam dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Secara keseluruhan, temuan empiris dalam penelitian ini sangat sejalan dengan hasil studi terdahulu dari Miftahurrahmah (2019) dan Octavia (2021). Kedua peneliti tersebut juga menemukan bukti empiris bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelebaran distribusi pendapatan, yang diakibatkan oleh intervensi kebijakan transfer pendapatan pemerintah dan homogenitas struktur ekonomi pada kelompok bawah.

#### **4.5.3 Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa Hipotesis 3 (H3) ditolak, yang berarti laju inflasi tahunan tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap fluktuasi ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia selama kurun waktu 1992–2022. Temuan ini menghadirkan diskursus yang menarik karena menyanggah postulat makroekonomi klasik, termasuk teori Aleš Bulíř (2001), yang mengasumsikan inflasi sebagai "pajak regresif" yang secara asimetris akan selalu memperlebar jarak kekayaan antara penduduk kaya dan miskin.

Ketidaksignifikanan dampak inflasi terhadap ketimpangan di Indonesia dapat dijelaskan melalui dua mekanisme pertahanan ekonomi makro yang beroperasi selama periode pengamatan. Pertama, dari sisi moneter, penerapan kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) oleh Bank Indonesia pasca-krisis 1998 berhasil menjangkar ekspektasi inflasi publik agar tidak bergerak liar.

Mayoritas periode observasi dalam penelitian ini diwarnai oleh tingkat inflasi satu digit yang terkendali. Kondisi ini selaras dengan analisis Simanungkalit (2020), yang menegaskan bahwa inflasi pada level yang rendah dan stabil tidak memberikan daya rusak distributif. Sebaliknya, inflasi yang moderat justru mencerminkan geliat permintaan ekonomi yang memicu masyarakat untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya menekan pengangguran dan menjaga stabilitas pendapatan kelompok bawah.

Kedua, dari sisi fiskal, pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan *administered prices* (harga yang diatur pemerintah) melalui mekanisme subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan sembako. Ketika terjadi guncangan harga komoditas di pasar global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap difungsikan sebagai perisai (*shock absorber*) untuk menyerap selisih harga tersebut agar tidak dibebankan secara penuh kepada konsumen akhir. Intervensi kebijakan inilah yang secara efektif menahan transmisi inflasi, sehingga daya beli riil masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari ancaman penggerusan ekstrem.

Secara keseluruhan, netralisasi dampak inflasi melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal ini menjelaskan mengapa inflasi tidak terbukti memperburuk Indeks Gini. Temuan empiris ini secara solid mengonfirmasi dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanungkalit (2020) serta Prastiwi et al. (2020), yang juga membuktikan bahwa dalam konteks struktur perekonomian Indonesia, fluktuasi inflasi lebih merepresentasikan fenomena jangka pendek yang

tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mendistorsi atau memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan.

#### 4.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut dijabarkan sebagai berikut;

1. Pertama, penelitian menghadapi keterbatasan dalam proses pengumpulan data, terutama terkait ketersediaan dan konsistensi data deret waktu (*time series*) dari berbagai sumber sehingga memerlukan proses penyesuaian dan verifikasi agar data yang digunakan bersifat seragam.
2. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data *time series* periode 1992–2022 sehingga rentang observasi yang terbatas berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Ketiga, variabel inflasi memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh berbagai guncangan makroekonomi sehingga berpotensi tidak stasioner. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengujian stasioneritas pada setiap variabel sebelum estimasi model serta mempertimbangkan penggunaan metode ekonometrika yang sesuai dengan karakteristik data deret waktu apabila ditemukan adanya ketidakstasioneran.

4. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda yang belum secara khusus dirancang untuk menguji dinamika Hipotesis Kuznets dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan ekonometrika yang lebih sesuai, seperti model nonlinier atau metode deret waktu yang mampu menangkap hubungan dinamis antarvariabel, sehingga pengujian terhadap Hipotesis Kuznets dapat dilakukan secara lebih komprehensif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melalui rangkaian analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1992–2022, maka penelitian ini sampai pada beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 1992–2022. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sementara itu, variabel kuadrat pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan negatif, namun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan hubungan nonlinier antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang sejalan dengan Hipotesis Kurva Kuznets. Akan tetapi, penelitian ini belum mampu memberikan bukti empiris yang kuat untuk mengonfirmasi keberlakuan Kurva U-Terbalik Kuznets di Indonesia selama periode penelitian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi terbukti menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, namun proses pemerataan hasil pembangunan yang diprediksi oleh teori Kuznets belum dapat dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan hasil penelitian ini.

2. Tingkat kemiskinan tidak terbukti memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Fluktuasi angka kemiskinan nasional selama tiga dekade terakhir tidak secara langsung merombak struktur distribusi pendapatan antar-lapisan masyarakat. Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti PKH dan BLT yang efektif berfungsi sebagai bantalan yang menjaga batas konsumsi kelompok bawah, sehingga dinamika kemiskinan tidak mengakibatkan distorsi ekstrem pada jurang ketimpangan pendapatan nasional.
3. Laju inflasi tahunan terbukti tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Keberhasilan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga melalui kerangka penargetan inflasi, serta kebijakan fiskal berupa subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok (*administered prices*), telah berhasil menetralisasi dampak negatif inflasi. Hal ini menyebabkan perubahan harga barang dan jasa di pasar tidak menjadi faktor penentu dalam memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan riil masyarakat.
4. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, kuadrat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat signifikansi 10 persen. Model penelitian mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan sebesar 29,47 persen, sedangkan 70,53 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

## 5.2 Saran dan Masukan

Berdasarkan kesimpulan dan temuan empiris yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta bagi peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dengan periode pengamatan yang lebih panjang serta memperbarui data sesuai perkembangan kondisi perekonomian Indonesia agar mampu menangkap perubahan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan pendapatan secara lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan ekonometrika yang mampu mengatasi potensi endogenitas dan hubungan simultan antarvariabel, sehingga estimasi parameter menjadi lebih konsisten dan mampu menggambarkan hubungan kausal secara lebih baik dibandingkan pendekatan regresi linier konvensional.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan karakteristik data deret waktu yang digunakan, terutama kemungkinan adanya ketidakstasioneran pada variabel makroekonomi. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis hendaknya disesuaikan dengan karakteristik data agar hasil estimasi yang diperoleh lebih valid, konsisten, dan mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan penambahan variabel-variabel yang secara teoritis relevan serta penggunaan cakupan

data yang lebih luas, baik dari sisi periode pengamatan maupun unit analisis. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1231–1294.
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DI INDONESIA. *Journal of Public Policy and Applied Administration*. <https://doi.org/10.32834/jplan.v4i2.529>
- Ansari, S. (2023). The Kuznets Curve. Retrieved May 7, 2026, from <https://www.economicsonline.co.uk/definitions/the-kuznets-curve.html/>
- Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Ndependent: Journal of Economics*, 4(2), 52–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.63277>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2022*. Jakarta. Retrieved from [www.freepik.com/BPS](http://www.freepik.com/BPS)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. *Research on International Economic Relations*, 1–30.
- Bulíř, A. (2001). Does Inflation Matter? *IMF Staff Papers*, 48(1), 139–159.

- Dalal, D. K., & Zickar, M. J. (2012). Some Common Myths About Centering Predictor Variables in Moderated Multiple Regression and Polynomial Regression. *Organizational Research Methods*, 15(3), 339–362. <https://doi.org/10.1177/1094428111430540>
- De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2016). *Development Economics: Theory and practice*. Abingdon: Routledge.
- Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2), 259–287. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00099-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00099-6)
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160. <https://doi.org/10.2307/2673879>
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, A. U., & Taher, A. R. Y. (2025). Analisis Relevansi Hipotesis Kuznet Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2004-2023. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 3(3), 577–590. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/efebe.v3i3.263>

- Istiqomah, & Floresti, D. (2024). Economic Growth And Poverty: The Moderating Effect Of Income Inequality. *TRIKONOMIKA*, 23(1), 11–18. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v23i1.9242>
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Ekonomika Pembangunan : Masalah, Kebijakan, Dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, R., & Huda, S. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 91–99. <https://doi.org/10.33005/jdep.v3i2.115>
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45, 1–28.
- Miftahurrahmah. (2019). *Pengaruh PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Octavia, H. S. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–13.
- OECD. (2015). Principles of Corporate Governance 2015. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat : Pembuktian Hipotesis Kuznet.

*Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jgia.v1i1>

Pandiangan, Z. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. UIN Syekh Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan.

Prastiwi, D. H., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA TAHUN 2014-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 33–50.

Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 3(1), 87–108.

Ravallion, M. (2014). Inequality is Bad for the Poor. *NBER Working Paper*, (20791).

Robinson, S. (1976). A Note on the U Hypothesis Relating Income Inequality and Economic Development. *American Economic Review*, 66(3), 437–440.

Sari, R. N. I. (2021). *Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Setiawan, A., Fasa, M. I., & Nuraziza, A. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan Penduduk dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 9(2), 1–20.

- Simanungkalit, E. F. B. (2020). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Stiglitz, J. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Suarni, Sjarlis, S., & S, M. S. (2022). PENGARUH BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARRU. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 4(1), 53–67. <https://doi.org/10.37476/massaro.v4i1.2726>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43.
- The World Bank. (2015). *World Bank Annual Report 2015*. Washington DC.

The World Bank. (2016). *World Development Report : DIGITAL DIVIDENDS*. Washington DC.

The World Bank. (2023). *A New Era in Development*. Washington DC.

The World Bank. (2026). *Data World Bank - Gini (Persen) Indonesia*. Washington DC. Retrieved from

<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ID>

Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2015). *Economic Development* (12th ed.). New Jersey: Pearson.

Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4, Part 2), 1–84. <https://doi.org/10.1086/450136>

Wulandari, I., Darmayuda, & Asrina, P. (2025). Dampak Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Riau. *EDU RESEARCH*, 6(4), 2165–2175.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>

Zega, R. I., Harefa, Y., Lase, A., & Laoli, B. (2025). Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetehosi Afia Mazingo. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.11165>



**FEB UNDIP**